

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGEMBANGAN
OBYEK WISATA PANTAI PADA DINAS PARIWISATA DI KOTA
MAKASSAR**



Oleh:

A.DIANINDARWATI

Nomor Induk Mahasiswa : 105611103017

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGEMBANGAN OBYEK WISATA PANTAI PADA DINAS PARIWISATA DI KOTA MAKASSAR

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP)

Disusun dan Diajukan Oleh:

A.DIANINDARWATI

Nomor Induk Mahasiswa : 105611103017

Kepada

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR	
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN	
No. Induk Mahasiswa	03/03/2022
Nama Mahasiswa	Yag
Tempat	Smb. Alumnus
Tanggal	12/0258/ADN/2200
Waktu	WAT
Tempat	i

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pengembangan
Obyek Wisata Pantai Pada Dinas Pariwisata Di Kota
Makassar

Nama Mahasiswa : A.Dianindarwati

Nomor Induk Mahasiswa : 105611103017

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I


Dr. HJ. Budi Setiawati, M.Si

Pembimbing II


Dr. Jaelan Usman, M.Si

Mengetahui

Ketua Program Studi


Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
NBM: 991742

Dekan


Dr. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
NBM: 730727

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 054/FSP/A.4-II/VII/43/2022 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Selasa, 19 Juli 2022

TIM PENILAI

Ketua



Dr. Ihyami Malik, S. Sos., M.Si

NBM: 730727

Sekretaris



Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si


NBM: 992797

PENGUJI:

1. Dr. H.Mappamiring, M.Si (Ketua)



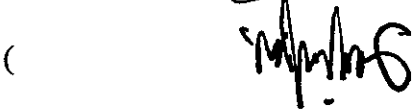
2. Dr. Muhammad Tahir, M.Si



3. Dr. Jaelan Usman, M.Si



4. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : A.Dianindarwati

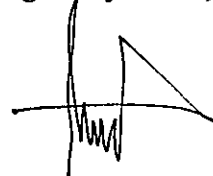
Nomor Induk Mahasiswa : 105611103017

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar Skripsi dengan judul Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pengembangan Obyek Wisata Pantai Pada Dinas Pariwisata Di Kota Makassar adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 13 April 2022

Yang Menyatakan,



A.Dianindarwati

ABSTRAK

(A.DIANINDARWATI, BUDI SETIAWATI, JAELAN USMAN)

Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pengembangan Obyek Wisata Pantai Pada Dinas Pariwisata Di Kota Makassar

Penelitian ini memiliki tujuan mendiskripsikan serta menjelaskan Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pengembangan Obyek Wisata Pantai Pada Dinas Pariwisata Di Kota Makassar. Dalam permasalahan di Dinas Pariwisata kota makassar masih belum terurus dengan baik karna belum adanya campur tangan dari pemerintah pusat baik dalam mengurus serta mengembangkan pariwisata tersebut sedangkan permasalahan di Dinas Kebudayaan kota makassar itu lebih mengarah ke pengembangan budaya yang ada di makassar dengan cara mengadakan semacam acara atau event kebudayaan untuk diperkenalkan langsung di kalangan masyarakat yang belum tau kebudayaan di setiap kota yang ada di makassar. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul ini supaya lebih tau lagi sistem kebijakan publik di setiap kantor dinas dalam mengembangkan pariwisata dan kebudayaan yang ada di kota makassar agar objek wisata bisa berkembang lagi di kalangan masyarakat dari luar Sulawesi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengembangan Obyek Wisata Pantai Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Di Kota Makassar, di lihat dari aspek: 1. Komunikasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar sudah dikatakan sangat bagus karena dari pihak kantor dinas selalu mementingkan komunikasi setiap bidang yang ada di kantor masing agar berjalan dengan sesuai SOP di setiap masing kantor dalam mewujudkan pelayanan yang bagus. 2. Sumber Daya, pihak kantor Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata sudah dikatakan bagus dalam menyediakan sumber daya alam di setiap objek wisata supaya masing objek wisata memiliki sumber daya alam yang bagus dalam menarik minat masyarakat yang datang untuk melakukan liburan, 3. Disposisi (Sikap Pelaksana), Oleh karena itu pihak kantor Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata Kota Makassar sudah dikatakan bagus karena setiap kantor masing pegawai sudah diberikan pelatihan tentang kebijakan pengembangan wisata yang ada di kota makassar, 4. Struktur Birokrasi, Oleh karena itu dari pihak kantor dinas sudah dikatakan bagus karena struktur birokrasi yang ada di masing kantor dinas sudah menerapkan struktur birokrasi yang sudah ditetapkan langsung dari kantor pusat.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, obyek wisata

KATA PENGANTAR



Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadiran allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pengembangan Obyek Wisata Pantai Pada Dinas Pariwisata Di Kota Makassar**

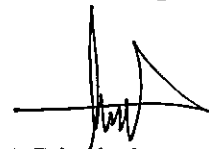
Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih untuk kedua orang tua saya senantiasa memberi dukungan, perhatian, kasih sayang, doa tulus tanpa pamrih dan selalu memberikan motivasi kepada saya. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. H. Ambo Asse M.ag. selaku rektor universitas muhammadiyah makassar
2. Ibu Dr. Hj Ihyani Malik S.Sos, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos.,M.Si selaku plt. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakulas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya
4. Ibu Dr. Hj Budi Setiawati M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Jaelan usman M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan

5. Ibu Dr. Hj Budi Setiawati M.Si selaku penasehat akademik (PA) yang selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis
6. Seluruh dosen dan staf pegawai di lingkup Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah mengajar dan membantu penulis hingga penulis sampai kejenjang ini
7. Segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan baik moral maupun materi
8. Bapak kepala Dinas Kebudayaan sekaligus staf-staf yang telah membantu saya dalam penyusunan tugas akhir
9. Bapak kepala Dinas Pariwisata yang telah membantu saya dalam kelancaran penelitian
10. Seluruh kawan-kawan saya yang telah membantu memberikan semangat serta berbagai informasi dalam menyusun tugas akhir.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 30 April 2022



A. Dianindarwati

DAFTAR ISI

Halaman judul	ii
Halaman Persetujuan Ujian Akhir	iii
Halaman Penerimaan Tim	ivv
Halaman Pernyataan	v
Abstrak	vii
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	xii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II Landasan Teori	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Teori/Konsep Implementasi Public Private Partnership	13
C. Implementasi Kebijakan Publik	14
D. Kerangka Pikir.....	21
E. Fokus Penelitian	22
F. Deskripsi fokus Penelitian.....	22
BAB III Metode Penelitian	27
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	27
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	27
C. Sumber Data.....	28
D. Infroman Penelitian	29
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Teknik Analisis Data	31
G. Teknik Keabsahan data.....	32
BAB IV hasil Penelitian Dan Pembahasan	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
B. Hasil Penelitian	48

C. Pembahasan Penelitian.....	66
BAB V Kesimpulan	71
A. Simpulan.....	71
B. Saran.....	72
Daftar Pustaka.....	73
Lampiran.....	75



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Proses Kebijakan Publik.....	21
Gambar 2.2 Kerangka Pikir	22
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata	48



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian	29
Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Makassar	37
Tabel 4.2 Jumlah Pegawai dari Segi Kepangkatan	40
Tabel 4.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	40
Tabel 4.4 Harga Tiket Masuk Pantai Akkarena	41
Tabel 4.5 Sarana Dan Prasarana Pantai Akkarena	58
Tabel 4.6 Nama Pegawai Dinas Pariwisata	58
Tabel 4.7 Sarana Dan Prasarana Pantai Akkarena	63
Tabel 4.8 Sarana Dan Prasarana Wisata Kuliner Pantai Akkarena	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pemerintah Daerah merupakan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pemerintah di daerahnya. Otonomi daerah menciptakan ruang gerak yang lebih bebas dalam membuat Kebijakan dan Peraturan daerah yang melibatkan pihak - pihak terkait sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan masyarakat masing - masing daerah tersebut tidak terkecuali dengan pembangunan sektor Kepariwisata.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penataan Kawasan Pulau, Pantai, Pesisir, dan Pelabuhan. Dan Peraturan daerah provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2030. Pembangunan sektor pariwisata sebagaimana kedudukannya sekarang ini, merupakan salah satu sektor unggulan (*leading sector*) dalam perekonomian Nasional yang senantiasa perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Jika ditinjau dari aspek sosial ekoomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan pemerintah, peningkatan penerimaan devisa meningkatkan kewirausahaan Nasional dan turut mendorong pembangunan di daerah. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kepariwisata, digariskan dalam pembangunan

Pariwisata perlu ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan penerimaan devisa serta memperkenalkan alam kebudayaan bangsa Indonesia. Menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata.

Bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan bangsa dengan tetap menetapkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pembangunan kepariwisataan harus tetap memperhatikan jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan menjadi salah satu modal utama dalam pembangunan kepariwisataan pada masa sekarang dan yang akan datang karena memiliki fungsi ganda, di samping sebagai aset sumber daya manusia, juga berfungsi sebagai sumber potensi wisatawan nusantara. Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman.

Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, ketertarikan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Sektor pariwisata indonesia memperkenalkan kebudayaan indonesia kepada wisata asing. Jadi faktor pariwisata memiliki kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan nasional, untuk itu segala potensi yang ada ditanah air perlu dimanfaatkan dengan sebaik baiknya. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan suatu konsep atau rumusan perencanaan pengembangan kepariwisataan secara nasional (RIPPDA) Rencana Industri Pengembangan Pariwisata Daerah, regional/ propinsi, dan lokal, kota, serta kabupaten.

Pemerintah kota makassar untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari sektor pariwisata. Pariwisata merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan wilayah regional dan nasional, karena pariwisata mencakup dan terkait dengan sektor lain seperti: kondisi politik, kamtibmas, telekomunikasi, perdagangan, dan industri serta sektor lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, RIPPDA Kota Makassar diharapkan dapat memiliki kekuatan hukum (perda) yang memiliki dasar tindakan pemerintah kota Makassar dalam mengatur, mengembangkan, dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam wilayahnya. Agar dapat diciptakan pembangunan yang Umum Tata Ruang Wilayah Kota Makassar, sehingga kedudukan RIPP Kota Makassar menjadi acuan dalam perencanaan pariwisata yang lebih detail/teknis.

Potensi pengembangan sektor pariwisata di kota makassar mempunyai prospek yang cukup potensial karena mempunyai berbagai jenis obyek wisata meliputi: wisata alam, wisata tirta, kekayaan khasanah sejarah keunikan seni budaya dan kekhasan cendera mata. Agar dapat meningkatkan kunjungan wisatawan maka, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar perlu

melakukan promosi wisata yang terdiri atas promosi dalam dan luar negeri, seperti menerbitkan *leaflet*, *booklet*, *guide book*, dan rekaman audio visual lainnya yang bermutu standar, pemasangan berbagai iklan dan artikel majalah internasional, berpartisipasi di dalam event-event internasional, nasional, dan regional yang berkaitan dengan promosi wisata dengan maksud dan tujuan mampu memperkenalkan destinasi wilayah kota Makassar.

Pertimbangan peneliti setelah melakukan pengamatan dilapangan di Dinas Pariwisata di kota makassar memberikan potensi pengembangan sektor pariwisata yang ada di kota makassar karena memberikan prosepek yang cukup potensial yang sangat besar untuk mempunyai berbagai jenis objek wisata meliputi: wisata alam, wisata tirta, kekayaan khasanah sejarah keunikan seni budaya dan cirikhas cendera mata. Oleh karena itu dinas pariwisata bisa berkembang lagi dalam menata objek wisata yang ada di kota makassar supaya lebih dikenal oleh masyarakat atau wisatawan dari luar daerah.

Oleh karena itu, untuk keberhasilan kepariwisataan di kota makassar, Dinas pariwisata dan Ekonomi Kreatif diharapkan dapat melaksanakan fungsi sebagai produsen sekaligus sebagai koordinator daari beberapa kepariwisataan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Makassar yaitu dengan cara mempertahankan penataan yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Makassar yang tersedia di kawasan Pantai Akkarena yang di mana sebelumnya para pelaku usaha berjualan di badan jalan sekitar anjungan pantai losari Kota Makassar. Tetapi untuk menarik calon pembeli pada sebuah produk baru maka pelaku usaha harus dapat menyakinkan dan menumbuhkan daya tarik terhadap

produknya dengan cara pemerintah Kota Makassar tetap memantau serta memberikan perberdayaan para pelaku usaha agar selalu menjaga kebersihan lingkungan setiap area wisata kuliner. Karena kegiatan penjualan hanya mungkin terjadi bila orang sudah mempuyai perhatian, sehingga pada akhirnya konsumen tertarik membeli produk yang ditawarkan. Dengan adanya pemberdayaan yang efektif dapat menumbuhkan serta membangkitkan niat pembeli.

Makanan kuliner merupakan salah satu jenis makanan yang memiliki dampak yang sangat besar bagi perkembangan suatu daerah. Nilai positif yang dapat diperoleh dari wisata yang datang untuk menumbuh kembangkan potensi makanan asli daerah yang sudah mulai tergeser oleh produk- produk asing, seperti pizza dari itali, masakan jepang dan masakan luar negeri lainnya.

Disetiap daerah di pelosok nusantara masing – masing memiliki keragaman kuliner yang khas, mulai dari rasa sampai cara penyajiannya yang sangat cepat menimbulkan selera makan masyarakat. Tidak berbeda dengan daerah lainnya, Kota Gorontalo juga memiliki keragaman kuliner yang dapat menarik wisatawan lokal maupun asing yang asing untuk berkunjung dan mencicipi aneka kuliner yang tersedia adapun data kunjungan wisatawan yang datang berkunjung ke makassar dalam periode 3 tahun terakhir, dimana tahun 2008 jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung ke Makassar mencapai 1.511.680 wisatawan, dan dari wisatawan mancanegara mencapai 24.591 wisatawan, dan pada tahun 2009 jumlah wisatawan nusantara mencapai 2.010.121 dan wisatawan mancanegara 28.223 wisatawan, pada tahun 2010 dimana jumlah wisatawan nusantara mencapai 2.072.538, dan wisatawan mancanegara mencapai 28.699.

Kebutuhan masyarakat Kota Makassar terhadap kawasan ruang publik sebagai obyek wisata dan kawasan Pantai Akkarena merupakan salah satu ikon pariwisata yang terjangkau menjadikan dibutuhkan pemberdayaan pelaku usaha wisata kuliner losari dapat menjadi solusi perekonomian usaha kecil, dan Menengah yaitu pendidikan, pelatihan dan penyuluhan guna untuk mewujudkan efektivitas kawasan pariwisata pantai losari yang tertib dan nyaman bagi pengunjungnya.

Menurut Djabbari, (2021), Implementasi Public Private Partnership dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Toraja Utara, secara umum inti dari Public Private Partnership (PPP) yaitu keterkaitan dan sinergi yang berkelanjutan (dalam kontrak kerjasama yang panjang) untuk membangun suatu proyek atau fasilitas public dalam meningkatkan pelayanan publik antara pemerintah selaku regulator, perbankan/konsorsium selaku penyandang dana dan pihak swasta/BUMN/BUMD yang berperan sebagai Special Purpose Company (SPC) yang bertanggungjawab dalam melaksanakan suatu proyek mulai dari proses desain, konstruksi, pemeliharaan dan operasional. Osborne menjelaskan pendekatan dalam kerjasama pemerintah dan swasta (Public Private Partnership) dipandang menjadi hal penting dalam memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana dasar perkotaan serta peningkatan pelayanan kebutuhan dasar pada masyarakat. Selain itu, dengan adanya keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki pemerintah, baik berupa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya lainnya seperti anggaran atau keuangan maka keterlibatan sektor swasta (private) menjadi penting didalam urusan publik untuk memenuhi ketersediaan

sarana prasarana dasar perkotaan dan peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.

Peneliti menggunakan teori mulyono yalia dalam kajian implementasi kebijakan pengembangan dan pemberdayaan lembaga sosial media tradisional di jawa barat dalam teori ini peneliti memperkuat pembahasan dalam skripsi dan peneliti juga mendapatkan indikator yang kuat dalam pembahasan ini. Adapun beberapa indikator yang didapat oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi,

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar sudah dikatakan sangat bagus karena dari pihak kantor dinas selalu mementingkan komunikasi setiap bidang yang ada di kantor masing agar berjalan dengan sesuai SOP disetiap masing kantor dalam mewujudkan pelayanan yang bagus dikantor.

2. Sumber Daya

Dari pihak kantor Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata sudah dikatakan bagus dalam menyediakan sumber daya alam disetiap objek wisata supaya masing objek wisata memiliki sumber daya alam yang bagus dalam menarik minat masyarakat yang datang untuk melakukan liburan bersama keluarga.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Oleh karena itu pihak kantor Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata Kota Makassar sudah dikatakan bagus karena, setiap kantor masing pegawai sudah diberikan pelatihan tentang kebijakan pengembangan wisata yang ada di kota makassar. Supaya pegawai tersebut bisa menerapkan ilmu yang diberikan

langsung dari kantor dan bisa berjalan dengan keinginan dari kantor pusat setiap pegawai diberikan tugas untuk menghendel semua kegiatan yang ada disuatu objek wisata supaya berjalan dengan rapi dan sesuai dengan program yang sudah berlakukan oleh pihak kantor dinas.

4. Struktur Birokrasi.

Oleh karena itu dari pihak kantor dinas sudah dikatakan bagus karena struktur birokrasi yang ada di masing kantor dinas sudah menerapkan struktur birokrasi yang sudah ditetapkan langsung dari kantor pusat. Agar struktur birokrasi di masing kantor bisa berjalan dengan baik sesuai kebijakan untuk mengembangkan suatu objek wisata yang ada di kota makassar.

Mencermati latar belakang di atas terkait dengan “ **Implementasi Kebijakan publik dalam pengembangan Obyek Wisata Pantai Pada Dinas Pariwisata Di kota Makassar**”

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengembangan Obyek Wisata Pantai Di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Sistematika kebijakan pengembangan obyek wisata pantai Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Di Kota Makassar

Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan serta pengembangan usaha pariwisata Di Kota Makassar

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat baik secara akademis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Peneliti berharap melalui hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi dunia perguruan tinggi Khususnya Jurusan Ilmu Administrasi Negara guna untuk mengembangkan lebih luas dan lebih mendalam tentang implementasi kebijakan pengembangan obyek wisata pantai pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Di Kota Makassar

2. Manfaat Praktis

Diharapkan mampu menjadi bahan referensi dan pertimbangan bagi pemerintah Kota Makassar terlebih khusus Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata terkait implementasi kebijakan pengembangan obyek wisata pantai di kota makassar

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian - penelitian terdahulu yang relevan dalam mendukung peneliti ini, diantaranya:

Revalda A.J.B. Salakory, 2017, "Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat Di Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah" tujuan dari penulisan ini adalah merumuskan konsep pengembangan ekowisata berbasis masyarakat guna sebagai rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pembuatan kebijakan pengembangan. Adapun metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam merancang suatu konsep serta strategi pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, hal mendasar yang harus dilakukan adalah mengenalkan masyarakat tentang konsep ekowisata dikarenakan sebagian besar pengelolaan destinasi di Kepulauan Banda maupun daerah Maluku masih jauh dari konsep ekowisata yang mempertimbangkan warisan budaya, partisipasi dan kesejahteraan masyarakat lokal serta upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Selain itu, persepsi masyarakat tentang kehadiran destinasi ekowisata agar kegiatan pengembanggan sesuai dengan keinginan masyarakat tanpa mengabaikan kebutuhan wisatawan.

Rusyidi & fedryansyah, (2018) "pengembangan pariwisata di Kawasan pantai rambak dan pantai Rebo" pada dasarnya merupakan gambaran dari

keseluruhan upaya pengembangan industri pariwisata di kabupaten bangka. Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan model alternative yang dapat digunakan untuk pengembangan pariwisata di wilayah kabupaten bangka.

Salah satu faktor penting pengembangan pariwisata adalah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga peserta dalam pengembangan pariwisata di daerahnya. Dari hasil survey lapangan, gambaran perkembangan pariwisata di kabupaten bangka sudah diketahui dengan baik. Dalam sepuluh tahun terakhir, seiring dengan menurunnya mata pencaharian masyarakat industri pertambangan timah, pariwisata menjadi salah satu pionir kegiatan ekonomi masyarakat. Pembatasan pemerintah terhadap wilayah dan kegiatan penambangan timah rakyat telah mengurangi kesempatan kerja di bidang ini, sehingga masyarakat berusaha mencari industri alternatif

Wilayah kerja sektor pariwisata yang dimasuki masyarakat tidak terbatas pada pekerjaan langsung seperti staf hotel, tetapi juga mencakup wilayah kerja lain yang berkaitan dengan pariwisata itu sendiri. misalnya, pengembangan makanan olahan hasil laut, kerajinan tangan dan usaha lainnya. Sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pariwisata, industri memasak juga meningkat dengan meningkatnya partisipasi masyarakat.

Damara (2014) Wisatawan domestik yang berkunjung ke bandung tentunya memiliki tujuan tertentu untuk datang ke kota wisata ini, seperti liburan,kebutuhan bisnis,tugas kantor,dan mengunjungi kerabat dekat..motivasi merupakan hal yang sangat mendasar untuk memahami wisatawan dan perjalanan wisata,karena

motivasi merupakan suatu penggerak dari proses perjalanan wisata. motivasi dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. *Motivasi fisik*, yaitu motivasi fisik, yang meliputi rekreasi, kesehatan, kenyamanan, partisipasi dalam kegiatan olahraga, relaksasi, dan lain-lain.
- b. *Motivasi budaya*, ialah keinginan untuk memahami budaya, adat istiadat, tradisi dan kesenian daerah lain. termasuk minat terhadap berbagai benda cagar budaya.
- c. *Motivasi fantasi*, merupakan motivasi sosial, seperti mengunjungi teman dan keluarga, bertemu dengan rekan kerja, melakukan hal-hal yang diyakini dapat mendatangkan gengsi (prestise). Ziarah, dan menghindari situasi yang membosankan atau bias juga seseorang di bidang lain yang bisa menghilangkan motif konvensional

Mengingat bandung merupakan tempat wisata instan, bandung dipilih untuk menarik wisatawan domestic dan mancanegara. Selain menyediakan berbagai atraksi wisata, kondisi akomodasi yang semakin membaik menjadikan bandung sebagai salah satu tujuan utama wisatawan asing dari singapura dan malaysia, serta negara-negara eropa barat. Sebenarnya sangat nampak, namun banyak tempat wisata yang sedang dikembangkan belum masuk dalam rencana pengembangan pariwisata sebelum muncul permasalahan yang disebabkan oleh faktor tidak aman. Pariwisata adalah gejala perpindahan manusia yang bersifat sementara dan spontan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan tertentu. Gejala tersebut secara tidak langsung

mendorong konsumsi dan produksi barang dan jasa yang dibutuhkan wisatawan.

B. Teori/Konsep Implementasi Public Private Partnership

Menurut Djabbari, (2021), secara umum inti dari Public Private Partnership (PPP) yaitu keterkaitan dan sinergi yang berkelanjutan (dalam kontrak kerjasama yang panjang) untuk membangun suatu proyek atau fasilitas public dalam meningkatkan pelayanan publik antara pemerintah selaku regulator, perbankan/konsorsium selaku penyandang dana dan pihak Swasta/BUMN/BUMD yang berperan sebagai Special Purpose Company (SPC) yang bertanggungjawab dalam melaksanakan suatu proyek mulai dari proses desain, konstruksi, pemeliharaan dan operasional. Osborne menjelaskan pendekatan dalam kerjasama pemerintah dan swasta (Public Private Partnership) dipandang menjadi hal penting dalam memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana dasar perkotaan serta peningkatan pelayanan kebutuhan dasar pada masyarakat. Selain itu, dengan adanya keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki pemerintah, baik berupa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya lainnya seperti anggaran atau keuangan maka keterlibatan sektor swasta (private) menjadi penting didalam urusan publik untuk memenuhi ketersediaan sarana prasarana dasar perkotaan dan peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.

Public Private Partnership (PPP) merupakan pengaturan antara pemerintahan dan entitas swasta dalam penyediaan layanan infrastruktur dan merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan sumber pendanaan tambahan bagi investasi infrastruktur. Melalui kerjasama pemerintah swasta, keahlian dan asset dari

pemerintah dan swasta yang bekerjasama dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat serta melakukan kerjasama dimana resiko dan manfaat potensial dalam menyediakan pelayanan ataupun fasilitas dibagi kepada pemerintah dan kepada swasta, dalam bentuk kerjasama PPP ini pemerintah masih memiliki wewenang didalam perusahaan atau organisasi swasta yang diajak bekerjasama.

Sektor swasta (PPP) dalam menangani urusan publik untuk pembangunan dan dalam hal penyediaan infrastruktur atau fasilitas publik dikarenakan keterbatasan anggaran dan sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah serta dinilai pula bahwa usaha swasta lebih cepat dan efisien jika dibanding dengan pemerintah. Efisiensi cara kerja sektor swasta, kualitas SDM yang mereka miliki, kecepatan adopsi terhadap perkembangan teknologi sering menjadi alasan perlu melibatkan sektor swasta (PPP) dalam memberika pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan sektor swasta dianggap memiliki insentif dan kemampuan yang lebih besar dalam memberikan dan memngelola biaya pelayanan yang lebih efisien. Selain itu, keberfokusan pada pelayanan yang berkaitan langsung dengan mekanisme pembayaran akan mendorong pelaksanaan proyek menjadi lebih cepat dan pemeliharaan asset yang lebih baik selama masa konses.

C. Implementasi Kebijakan Publik

1. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Mulyono Yalia, (2014), Kebijakan publik salah satu dimensi pokok dalam ilmu administrasi publik. Sebagai salah satu unsur kepentingan dalam administrasi publik, kebijakan publik dianalogikan fungsinya sama dengan fungsi

otak dan tubuh manusia, karena melalui instrument ini, segala aktivitas kehidupan bernegara, dan bermasyarakat mulai dilakukan oleh birokrasi, plus pihak swasta dan masyarakat.

Abidin (2004:192-193) menyatakan bahwa secara umum suatu kebijakan dianggap berkualitas dan mampu dilaksanakan bila mengandung beberapa elemen,yaitu:

Tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang dipakai untuk mengadakan kebijakan itu, dimana tujuan kebijakan dianggap baik apabila tujuannya:

1. Rasional, yaitu tujuan dapat dipahami atau diterima oleh akal sehat.hal ini terutama dilihat dari faktor-faktor pendukung yang tersedia, dimana suatu kebijakan yang tidak mempertimbangkan faktor pendukung tidak dapat dianggap kebijakan nasional.
2. Diinginkan (desirable), yaitu tujuan dari kebijakan menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga mendapat dukungan dari banyak pihak.
3. Asumsi yang dipakai dalam proses perumusan kebijakan itu realistis, asumsi tidak mengada-ada.Asumsi juga menentukan tingkat validasi suatu kebijakan.
4. Informasi yang digunakan cukup lengkap dan benar, dimana suatu kebijakan menjadi tidak tepat jika didasarkan pada informasi yang tidak benar atau sudah kadaluarsa

Tipologi kebijakan publik menurut Anderson (1979:126), dikutip dari buku Dasar-Dasar Kebijakan Publik menyatakan bahwa:

a. Kebijakan substantif atau kebijakan prosedural

Kebijakan ini meliputi kebijakan yang akan dilakukan pemerintah, seperti pendidikan, kesehatan, bantuan bagi usaha kecil dan menengah, atau pembayaran keuntungan bagi kesejahteraan rakyat dan lain-lain.

b. Kebijakan liberal dan kebijakan konservatif

Kebijakan liberal adalah kebijakan yang mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan - perubahan sosial mendasar terutama diarahkan untuk memperbesar hak-hak persamaan (civil liberties and civil night). Sedangkan kebijakan konservatif telah menekankan pada aturan sosial yang mereka anggap sudah baik dan mapan, jadi upaya untuk melakukan perubahan sosial tidak perlu melakukan (melakukan status quo).

c. Kebijakan distributif

Kebijakan distributif terdiri dari penyebaran pelayanan atau keuntungan pada sektor khusus, misalnya beras raskin, kartu jaminan sehat dan lain lain.

d. Kebijakan redistributive

Contoh kebijakan ini antara lain pengelompokan pajak pendapatan, pemberantasan masalah kemiskinan, kesehatan, dan lain – lain.

e. Kebijakan regulator

Kebijakan regulator adalah kebijakan tentang penggunaan pembatasan atau larangan pembuatan atau tindakan bagi orang atau kelompok orang. Contohnya larangan penjualan senjata api di pasaran.

f. Kebijakan self- regulatory

Kebijakan jenis ini adalah peraturan kebijakan yang berupaya untuk membatasi atau mengawasi beberapa bahan atau kelompok. Contohnya pemberian izin mengemudi dan lain- lain.

Menurut Edward III, (1980), Adapun Implementasi Kebijakan pengembangan Obyek Wisata Pantai Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Di kota Makassar yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi,

Pada umumnya diartikan sebagai hubungan atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah hubungan, atau diartikan pula sebagai saling tukat-menukar pendapat. Adapun jenis komunikasi dalam menunjang pengembangan obyek wisata yakni melalui:

a. Sosialisasi.

Sosialisasi ini bertujuan menyebarluaskan informasi kepada publik serta menambah wawasan pengetahuan bagi bertujuan agar masyarakat paham dan mengerti tentang pentingnya aspek pariwisata dikembangkan dalam meningkatkan ekoonomi daerah.

b. Promosi.

Strategi promosi dalam sektor pariwisata penting dilakukan karena sektor pariwisata merupakan industri yang terus berkembang pesat dan persaingan akan semakin ketat, sehingga strategi promosi pariwisata memiliki peran yang sangat besar.

2. Sumber Daya,

Merupakan segala sesuatu yang memainkan peran penting dalam menarik wisatawan untuk mempelajari kawasan termasuk di dalamnya sumber daya alam, peristiwa kepariwisataan fasilitas rekreasi, dan daya tarik wisata. Adapun sumber daya yang dimaksud yakni:

a. Fasilitas.

Fasilitas wisata merupakan pelayanan pendukung yang dapat dimanfaatkan wisatawan dengan menawarkan mutu dan harga yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan dengan komponen seperti atraksi, akomodasi, kegiatan wisata, interpretasi maupun perencanaan manajemen.

b. Kewenangan.

Di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ini, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain berkaitan erat dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintah atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Setiap daerah dapat menggali potensi yang bisa dikembangkan, sehingga perkembangan masing-masing daerah dapat meningkat pesat. terdapat berbagai sektor yang dapat dikembangkan, diantaranya adalah sektor perdagangan, sektor jasa, sektor pertanian, sektor pariwisata dan lain-lain. Dari salah satu sektor tersebut yaitu sektor pariwisata, karena melalui undang-undang nomor 23 tahun 2014 ini pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur pengelolaan pertanahan di wilayahnya dan pengaturan pengelolaan kepariwisataan.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Sisposisi merupakan salah-satu faktor yang mempuyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif'. Jika para pelaksana mempuyai kecedenrungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

a. Penerapan Staf Dan Sikap.

Disposisi yaitu: komitmen dan sikap yang dimiliki para pelaksana program untuk melaksanakan keseluruhan kegiatan implementasi kebijakan pengembangan destinasi wisata. Dengan indikator-indikator sebagai berikut; 1) Komitmen dan sikap para pelaksana kebijakan 2) adanya persamaan persepsi antara implementor dengan dinas-dinas terkait dalam pelaksanaan pengembangan destinasi wisata. 3) kecukupan insentif bagi implementor.

b. Pegangkatan birokrasi

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pegangkatan dan pemilihan personel pelaksanaan kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

c. Insentif

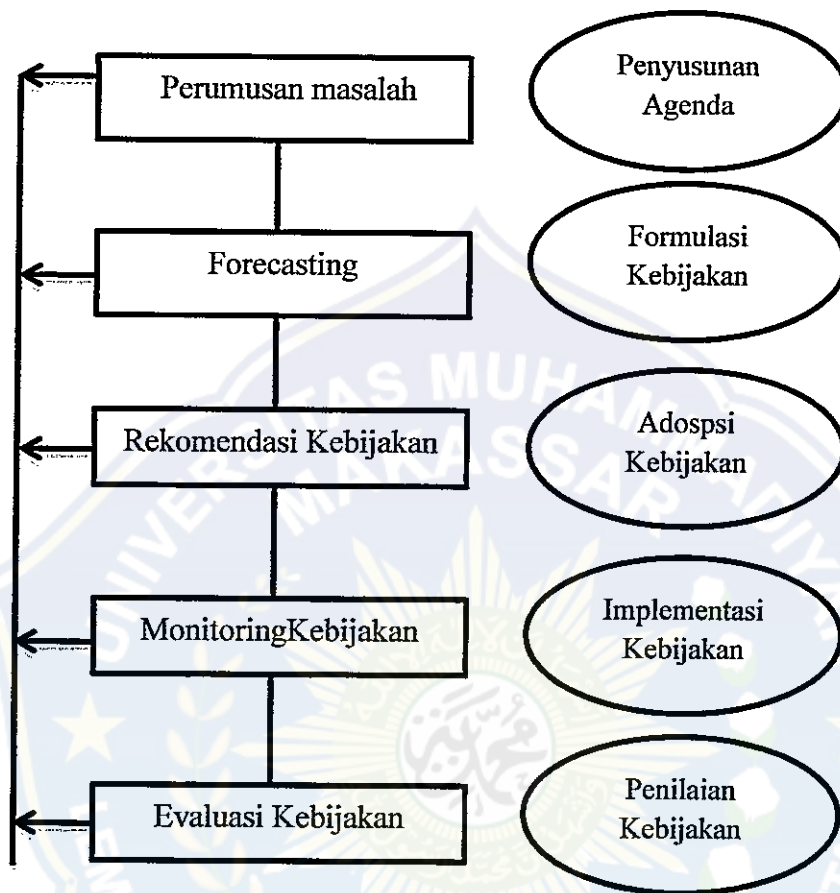
Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atas organisasi.

4. Struktur Birokrasi.

Struktur birokrasi, yaitu adanya suatu prosedur yang mengatur tata dan pola aliran pekerjaan dalam proses implementasi program. Dengan indikator-indikator sebagai berikut: 1) ketersediaan standar operating procedures 2) hubungan koordinasi yang baik dengan instansi-instansi terkait 3) kejelasan instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan

2. Proses Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat lebih mudah dipahami jika dikaji tahap demi tahap inilah yang menjadikan kebijakan dan kajiannya amat dinamis. Berbicara mengenai proses kebijakan publik Dunn menggambarkan proses kebijakan sebagai berikut:



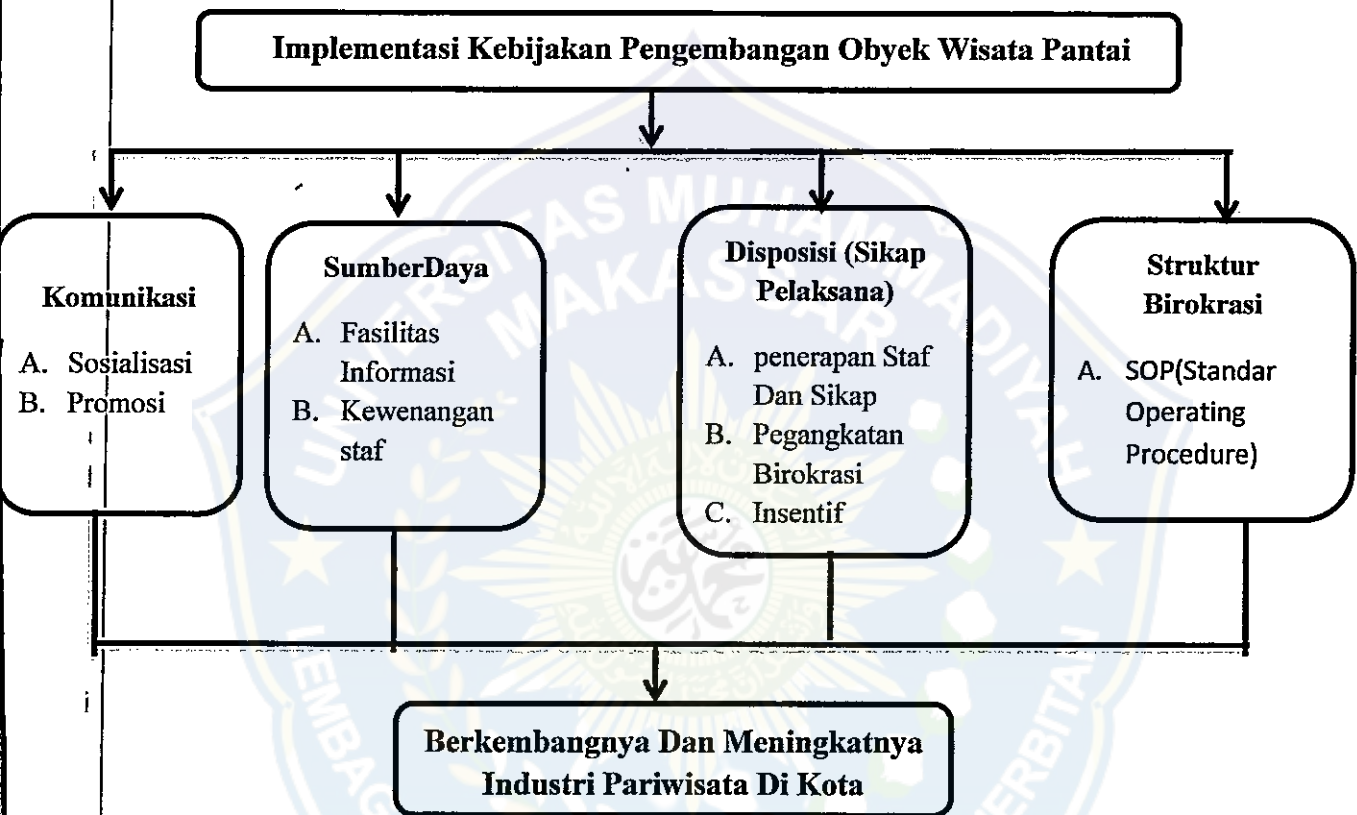
Gambar 2.1 Proses Kebijakan Publik

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan tinjauan pustaka, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka yang telah diuraikan maka setiap peneliti harus memiliki kerangka berfikir peneliti yang dijadikan sebagai pedoman dan arah dalam melakukan penelitian dilapangan.

Adapun Teori kebijakan Edward III, (1980:10) dalam Tahir, (2014:61) Mengemukakan Bahwa didalam pendekatan studi implementasi kebijakan pertanyaan abstraknya dimulai dari bagaimana pra kondisi untuk suksesnya kebijakan publik. maka Edward III, menawarkan empat faktor dalam

mengimplementasikan kebijakan publik,yakni:a) Komunikasi b) Sumber Daya c) Disposisi (Sikap Pelaksana) d) Struktur Birokrasi



Gambar 2.2 Kerangka Pikir

E. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Obyek Wisata Pantai Pada Pariwisata di Kota Makassar menggunakan indikator yang mempengaruhi konsep yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi (Sikap Pelaksana), Struktur Birokrasi.

F. Deskripsi fokus Penelitian

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagan kerangka pikir di atas, maka deskripsi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi,

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar sudah dikatakan sangat bagus karena dari pihak kantor dinas selalu mementingkan komunikasi setiap bidang yang ada di kantor masing agar berjalan dengan sesuai SOP disetiap masing kantor dalam mewujudkan pelayanan yang bagus dikantor. Oleh karena itu masing kantor selalu mengadakan meeting disetiap bidang agar karyawan bisa berkomunikasi langsung ke wisatawan yang datang dari luar sulawesi supaya bisa menerapkan sistem komunikasi yang baik dan sopan terhadap wisatawan. Adapun jenis komunikasi dalam menunjang pengembangan obyek wisata yakni melalui:

a. Sosialisasi.

Maka dari itu pihak Kantor Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata Kota Makassar sudah dikatakan bagus dalam mensosialisasikan objek wisata kepada pihak masyarakat. Supaya pihak masyarakat bisa mengetahui objek wisata yang belum didatangi langsung oleh masyarakat.

b. Promosi.

Maka dari itu pihak kantor Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata sudah dikatakan sangat bagus karena dari pihak kantor masing selalu melakukan promosi objek wisata yang baru di buka supaya menarik minat dari masyarakat untuk datang ke lokasi objek wisata yang baru dibuka.

2. Sumber Daya,

Maka dari itu pihak kantor Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata sudah dikatakan bagus dalam menyediakan sumber daya alam disetiap objek wisata supaya masing objek wisata memiliki sumber daya alam yang bagus dalam

menarik minat masyarakat yang datang untuk melakukan liburan bersama keluarga Adapun sumber daya yang dimaksud yakni:

a. Fasilitas.

Maka dari itu dari pihak Kantor Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata Kota Makassar sudah dikatakan bagus karena dari pihak kantor masing selalu menyediakan fasilitas bagus di masing objek wisata supaya masyarakat yang datang ke objek wisata tidak merasa bosan dalam menikmati liburan bersama keluarganya. Dari pengelola objek wisata selalu melakukan pengecekan di setiap fasilitas yang perlu di perhatikan kondisi agar fasilitas tersebut bisa di perbaiki langsung dari pusat.

b. Kewenangan.

Maka dari itu pihak kantor Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata Kota Makassar sudah dikatakan bagus dalam menjaga kewenangan di setiap objek wisata supaya berjalan dengan sesuai kesempatan bersama dalam merawat dan menjaga objek wisata lebih maju untuk kedepannya. Dari kantor dinas selalu berkomunikasi langsung kepada pemerintah pusat supaya bisa mengembangkan bersama suatu objek wisata yang ada di kota makassar.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana).

Disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif". Jika para pelaksana mempunyai kecederungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal.

a. Penerapan Staf Dan Sikap.

Maka dari itu pihak kantor Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata Kota Makassar sudah dikatakan bagus karena setiap kantor masing pegawai sudah diberikan pelatihan tentang kebijakan pengembangan wisata yang ada di kota makassar. Supaya pegawai tersebut bisa menerapkan ilmu yang diberikan langsung dari kantor dan bisa berjalan dengan keinginan dari kantor pusat setiap pegawai diberikan tugas untuk menghendel semua kegiatan yang ada disuatu objek wisata supaya berjalan dengan rapi dan sesuai dengan program yang sudah berlakukan oleh pihak kantor dinas

b. Pengangkatan birokrasi

Dari pihak masing kantor dinas sudah dikatakan bagus karena pengangkatan birokrasi setiap masing kantor menerapkan suatu sistem dala, mengangkat birokrasi terlebih dahulu mengadakan suatu pelatihan dan diklat setiap masing karyawan yang mau naik jabatan birokrasi yang ada di kantor supaya karyawan bisa diketahui kemampuan dan keterampilan yang dimiliki masing pegawai.

c. Insentif

Maka dari itu pihak setiap masing kantor sudah dikatakan bagus karena pihak atasan langsung memberikan insentif kepada bawahannya supaya karyawan merasa terdorong atas pemberian insentif langsung dari atasannya. Pihak kantor dinas itu sendiri memberikan insentif supaya karyawan lebih semangat lagi dalam bekerja dan mengembangkan suatu objek wisata yang ada di kota makassar.

4. Struktur Birokrasi.

Maka dari itu dari pihak kantor dinas sudah dikatakan bagus karena struktur birokrasi yang ada di masing kantor dinas sudah menerapkan struktur birokrasi yang sudah ditetapkan langsung dari kantor pusat. Agar struktur birokrasi di masing kantor bisa berjalan dengan baik sesuai kebijakan untuk mengembangkan suatu objek wisata yang ada di kota makassar.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini kurang lebih selama (dua) bulan. Lokasi penelitian ini berada di Dinas Pariwisata Di Kota Makassar implemmentasi penanaman usaha terkait perkembangan pariwisata dan penguatan modal merupakan sistem yang mampu memberikan informasi serta data- data terkait pariwisata pada suatu instansi atau perusahaan yang saling bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditargetkan , masalahnya adalah penelitian ini berusaha menjawab sistematika pengembangan pariwisata di kota makassar serta faktor pendorong dan pemicu penghambatnya untuk mengetahui kesesuaian fakta yang ada di lapangan dengan pedoman yang seharusnya sehingga dapat di ambil sebuah rekomendasi bagi kemajuan pariwisata di masa yang akan datang.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

2. Tipe penelitian

Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Tipe penelitian deskriptif merupakan sebuah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh dari pengamatan langsung (observasi), dan wawancara dilakukan oleh peneliti kepada informan di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan yang berpengaruh tentang bagaimana proses strategi promosi destinasi wisata yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan supaya upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan obyek yang dikaji. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip pada Kantor Dinas Kebudayaan dan pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Informan Penelitian

Tabel 3.1 Tabel Informan Penelitian

No	Nama informan	Inisial	Pekerjaan	Jumlah
1.	Dr. Syarifuddin,S.pd,M.pd,MM	SN	Plt Bidang Pelestarian Cagar Budaya	1
2.	Safaruddin	SD	Kepala Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata kota makassar	1
3.	Dwi Ariyanti	DA	Wisatawan Pantai Akkarena	1
4.	Nuraeni	NI	Wisatawan Pantai Akkarena	1
5.	Rahmatia	RA	Wisatawan Pantai Akkarena	1
6.	Hasnawati	HI	Masyarakat	1
	Jumlah	-	-	6

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah ini maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi,wawancara mendalam melalui metode purposive sampling, yang didasarkan pada ciri dan sifat dari sumber data yang dipandang mempunyai kemampuan dan keahlian yang mampu memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dimana peneliti dapat menentukan dan memilih subyek penelitian tersebut sebagai informan kunci

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (Interviewer) yang mengajukan pertanyaan terwawancara (Interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy j. Manolog , 2013). Jadi wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan dan berupa jawaban, keterangan, atau tanggapan dari subjek penelitian.

Penelitian ini menggunakan wawancara semi structured interviewer, Pedoman wawancara yang digunakan yaitu berupa garis- garis besar atau inti- inti permasalahan, yang nantinya akan dikembangkan dan dijadikan pertanyaan kepada subjek penelitian. Dengan demikian metode wawancara ini diharapkan akan mampu membantu peneliti dalam mendapatkan jawaban, informasi, keterangan, tanggapan maupun pernyataan dari subjek penelitian secara jelas tentang implementasi penanaman modal usaha terkait perkembangan pariwisata dan penguatan modal di kota Makassar.

Pengumpulan data-data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan berbagai cara agar tersusun secara lengkap. Untuk itu maka dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi, “Metode dokumentasi yakni metode dalam mencari data mengenai hal- hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda dan sebagainya” (Suarmisi Arikanto, 2010: 274).

2. Dokumen

Dokumen merupakan suatu acara pengumpulan data yang dihasilkan dari catatan penting yang sesuai dengan apa yang sedang diteliti. Catatan penting itu mempunyai fungsi untuk digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap data primer yang diperoleh dari teknik wawancara. Pengumpulan data melalui dokumen dilakukan karena dokumen merupakan catatan-catatan suatu peristiwa yang sudah berlaku yang biasanya berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya.

3. Obsevasi Lansung

Menggali data-data yang ada di lapangan pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi dan melakukan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena yang terjadi baik secara formal maupun informal

F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (Sugiono:2012) Analisis data ialah langkah untuk mengelola data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Dalam model ini terdapat tiga komponen pokok:

1. *Data Redaction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. seperti telah dikemukakan makin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data akan makin banyak. kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

3. *Conclusion Drawing / Verivication* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data kesimpulan data yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh kembali bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Teknik Keabsahan data

Salah satu cara yang digunakan peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Menurut Sukri Sugiyono (2013), Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Lebih lanjut Sugiyono membagi triangulasi ke dalam tiga macam, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan

hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangannya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi berbeda. Hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Makassar

Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang. Terletak antara $119^{\circ}24'17''38''$ Bujur Timur dan $5^{\circ}8'6''19''$ Lintang Selatan yang Berbatasan dibagian sebelah Utara perbatasan dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. Kota Makassar memiliki letak topografi dengan kemiringan lahan $0-2^{\circ}$ (datar) dan kemiringan $3-15^{\circ}$ (bergelombang). Berdasarkan wilayah Kota Makassar tercatat panjang wilayah 175,77 km persegi. Berdasarkan letak peta geografi Kota Makassar yang memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26°C sampai dengan 29°C .

Berdasarkan letak wilayah kota Makassar menjelaskan letak terdekat dengan lokasi pantai yang membentang sepanjang wilayah barat dan utara juga dikenal sebagai *Waterfront City* yang di dalamnya mengalir beberapa sungai (sungai Tallo, Jeneberang, dan Pampang) yang kesemuanya bermuara dengan sesuai didalam kota. Sesuai dengan letak kota makassar menjelaskan gambaran daratan rendah yang memiliki ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut. Berdasarkan kondisi ini menjelaskan Kota Makassar sering mengalami genangan air di musim hujan, berdasarkan pada saat turun hujan bersamaan dengan naiknya air pasang.

Kota Makassar (Makassar: kadang dieja macassar, mangkasar, dari 1971 hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai ujung pandang adalah sebuah kotamadya dan sekaligus ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kotamadya ini adalah kota terbesar pada 5°8'S 199°25 Koordinat: 5°8'S 119°25' di pesisir barat daya pulau Sulawesi, berhadapan dengan selat Makassar.

Kota Makassar (Macassar, Mangkasar, Ujung Pandang (1971 hingga 1999) adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia dan sekaligus sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di kawasan timur Indonesia. Sebagai pusat pelayanan di kawasan Timur Indonesia (KTI), kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Menjelaskan Kota Makassar terbagi atas 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Berdasarkan 15 kecamatan tersebut, terdapat tujuh kecamatan yang berbatasan dengan letak pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya, terdapat beberapa batas wilayah yang ada di Kota Makassar terbagi atas 4 batas wilayah sebagai berikut:

Batas Utara Kabupaten Maros

Batas Timur Kabupaten Maros

Batas Selatan: Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar

Batas Barat: Selatan Makassar

Menjelaskan secara umum letak topografi Kota Makassar dikelompokkan atas

2 bagian yang ada di wilayah Kota Makassar yaitu:

- a. Bagian Barat ke arah Utara relatif rendah dekat dengan pesisir pantai.
- b. Bagian Timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di Kelurahan Antang Kecamatan Panakukang.

Tabel 4.1
Daftar Kecamatan dan kelurahan di Kota Makassar

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Daftar Kelurahan
Wajo	8	Butung Ende Malimongan Malimongan Tua Mampu Melayu Melayu Baru Pattunuang
Ujung Tanah	9	Camba Berua Cambaya Gusung Pattinjalloang Pattinjalloang Baru Tabaringan Tamalabba Totaka Ujung Tanah
Ujung Pandang	10	Baru Bulogading Lae-Lae Lajangiru Losari Maloku Mangkura Pisang Selatan Pisang Utara Sawerigading
Tamalate	11	Balang Baru Barombong Bongaya Bonto Duri

		Jongaya Maccini Sombala Mangasa Mannuruki Pa'baeng-Baeng Parang Tambung Tanjung Merdeka
Tamalanrea	8	Bira Buntusu Kapasa Kapasa Raya Parang Loe Tamalanrea Tamalanrea Indah Tamalanrea Jaya
Tallo	15	Buloa Bunga Eja Beru Kalukuang Kaluku Bodoa La'latang Lakkang Lembo Pannampu Rappojawa Rappokalling Suangga Tallo Tammua Ujung Pandang Baru Wala-Walaya
Rappocini	11	Balla Parang Banta-Bantaeng Bonto Makkio Bua Kana Gunung Sari Karunrung Kassi-Kassi Mapala Minasa Upa Rappocini Tidung
Panakkukang	11	Karampuang Masale Pampang Panaikang Pandang

		Sinrijala Tamamaung Karuwisi Karuwisi Utara Paropo Tello Baru
Mariso	9	Bontorannu Kampung Buyang Kunjung Mae Lette Mario Mariso Mattoangin Panambungan Tamarunang
Manggala	8	Antang Bangkala Batua Biring Romang Bitowa Borong Manggala Tamangapa
Mamajang	13	Baji Mappakasunggu Bonto Biraeng Bonto Lebang Karang Anyar Labuang Baji Mamajang Dalam Mamajang Luar Mandala Maricaya Selatan Pa'batang Parang Sambung Jawa Tamparang Keke
Makassar	14	Bara-Baraya Bara-Baraya Selatan Bara-Baraya Timur Bara-Baraya Utara Barana Lariang Bangi Maccini Maccini Gusung Maccini Parang Maradekaya

		Maradekaya Selatan Maradekaya Utara Maricaya Maricaya Baru
Kepulauan Sangkarrang	3	Barrang Caddi Barrang Lompo Kodingareng
Bontoala	12	Baraya Bontoala Bontoala Parang Bontoala Tua Bunga Ejaya Gaddong Layang Malimongan Baru Parang Layang Timungan Lompoa Tompo Balang Wajo Baru
Biringkanaya	11	Bakung Berua Bulurokeng Daya Katimbang Laikang Paccerakkang Pai Sudiang Sudiang Raya Untia
TOTAL	153	

Sumber: Wikipedia

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan bahwa jumlah pegawai di Dinas Kebudayaan dari segi tingkat kepangkatan, paling banyak didominasi karyawan tingkat tenaga kontrak/ honorer karena di kantor dinas kebudayaan paling banyak menerima karyawan kontrak/ honorer dari pihak kantor dinas kebudayaan kota makassar sudah mengetahui keterampilan semua karyawan sebelum mengontrak karyawannya.

Tabel 4.2
Jumlah Pegawai Dari Segi Kepangkatan

Urutan Pangkat	Jumlah (Orang)	Persentase %
Pembina / Golongan IV	6	6,06 %
Penata / Golongan III	36	36,36 %
Pengatur / Golongan II	19	19,19 %
Tenaga Kontrak / Honoror	32	32,39 %
Jumlah	99	100

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Makassar

Berdasarkan data diatas bahwa jumlah pegawai dari segi kepangkatan di Dinas Pariwisata Kota Makassar didominan dengan karyawan golongan III (Penata) karna di kantor tersebut banyak karyawan Dinas Pariwisata naik pangkat atau jabatan dalam meningkatkan kualitas dan kinerja setiap bagian yang ada di kantor tersebut.

Tabel 4.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase %
Master (S2)	13	13 %
Sarjana (S1)	37	37 %
Diploma (D3)	13	13 %
SLTA/SMK	36	36 %

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Makassar

Berdasarkan data diatas bahwa jumlah pegawai berdasarkan pendidikan di kantor Dinas Pariwisata Kota Makassar paling banyak didominan tingkat pendidikan SLTA/SMK karena pihak Dinas Pariwisata sudah mengetahui kemampuan dan bakat karyawan yang tamatan SMK yang melamar pekerjaan di kantor supaya tidak lama dalam mengajari karyawan baru tanpa memiliki pengetahuan di bidang pariwisata.

Tabel 4.4
Harga Tiket Masuk Pantai Akkarena & Harga Tiket Parkir

Harga Tiket Masuk Pantai Akkarena			Harga Tiket Parkir		
Hari Biasa	Hari Weekend	Tiket Wahana	Motor	Mobil	Bus
10.000 per-orang	15.000 per-orang	20.000-25.000	5.000	10.000	10.000

Sumber: Pantai Akkarena

Berdasarkan data diatas bahwa harga tiket masuk Pantai Akkarena itu sendiri beragaram harga tiket masuk ke dalam pantai karena pihak pengelolaan pantai itu sendiri sudah memasang patok harga tiket untuk masuk ke lokasi wisata walaupun ada masyarakat yang mau bermain di wahana pantai Akkarena itu mesti harus membayar lagi karena wahana yang ada didalam pantai Akkarena itu tidak termasuk dengan harga tiket masuk ke dalam pantai Akkarena. Sedangkan harga tiket parkir itu sendiri di bayar terpisah karna pihak pengelolaan pantai Akkarena itu tidak dimasukkan ke dalam harga tiket masuk ke pantai Akkarena.

2. Gambaran Umum Kantor dinas pariwisata

Dinas pariwisata kota makassar merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah yang menangani dan menggerakkan pembangunan pariwisata kota makassar yang didasarkan pada upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara serta mempromosikan destinasi wisata yang ada di kota makassar.

Dinas Pariwisata Kota Makassar dulunya bernama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar, yang kemudian dipisah karena masing –masing berdiri sendiri Muncullah nama baru menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar. Pada pertengahan tahun 2016, Dinas Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif kota Makassar memisahkan kembali Ekonomi Kreatif menjadi Dinas Pariwisata Kota Makassar sampai dengan sekarang. Kantor Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Makassar bertempat di jalan Jend. Urip Sumuharjo. Maccini No.58 Kecamatan Makassar.

Kini Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Makassar memiliki keseluruhan staff berjumlah 97 orang dan di pimpin oleh kepala Dinas bernama Muhammad Roem S.STP, Msi Terdapat 4 bidang didalamnya antara lain bidang ekonomi kreatif, bidang promosi dan pemasaran, bidang pengembangan destinasi, dan bidang pengembangan kapasitas.

Sebagai Dinas teknis yang menangani pariwisata, Dinas Pariwisata mempunyai tantangan yang sangat kuat untuk memenuhi tugas tersebut. Untuk memperoleh hasil yang maksimal dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sekaligus mewujudkan visi Kota Makassar maka diperlukan upaya-upaya pengembangan segenap potensi dan sumber daya sebagai kekuatan internal yang harus saling bersinergi secara optimal dalam rangka peningkatan manajemen Dinas Pariwisata.

a. Visi dan Misi

1. Visi

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah Kota Makassar,

merupakan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang memiliki otoritas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Peran Dinas Pariwisata dan diarahkan untuk mendukung pencapaian visi daerah Kota Makassar, oleh karena itu Dinas Pariwisata telah menetapkan Visi yaitu :“Terwujudnya Kota Makassar Sebagai Destinasi Pariwisata Dunia”

Makna pokok yang terkandung dalam visi Dinas Pariwisata Kota Makassar tersebut merupakan hasil pendalaman dari rangkaian antara kegiatan dan substansi tupoksi serta jati diri pelayanan yang merupakan eksistensi dari Dinas Pariwisata Kota Makassar yang diwujudkan dalam peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Destinasi Pariwisata artinya bahwa pengembangan pariwisata Kota Makassar didasarkan pada upaya untuk meningkatkan wisatawan dan mempromosikan objek wisata melalui perencanaan dan pembangunan terpadu dari alam, budaya, dan sejarah masyarakat sehingga terbentuk ikon pariwisata yang berdaya saing dan unggul dalam menggerakkan pembangunan ekonomi Kota Makassar.

Dunia artinya bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata Kota Makassar harus memiliki daya saing yang unggul dan terkemuka sehingga mampu mengembalikan citra Kota Makassar sebagai bandar dunia yang menarik dikunjungi oleh wisatawan mancanegara dan nusantara melalui penyediaan dan pengembangan aksesibilitas, atraksi wisata, aktivitas wisata, akomodasi dan sarana prasarana penunjang kegiatan wisata yang berkualitas, berkelanjutan dan berkelas dunia.

2. Misi

Sebagai upaya umum untuk mewujudkan visi tersebut maka disusunlah misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Pariwisata Kota Makassar 2014-2019 sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Promosi dan pemasaran pariwisata yang terarah dan terencana.
- 2) Penataan dan pengembangan usaha industri pariwisata dalam meningkatkan daya saing.
- 3) Peningkatan kompetensi dan daya saing SDM pariwisata Kota Makassar yang berstandar internasional.
- 4) Peningkatan kapasitas kelembagaan Dinas Pariwisata Kota Makassar. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Dinas Pariwisata Kota Makassar, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima tahun kedepan). Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Dinas Pariwisata Kota Makassar, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan spesifik, terperinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

b. Kedudukan

Dinas Pariwisata Kota Makassar merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas

Pariwisata dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris Daerah.

c. Tugas dan Fungsi

1. Tugas

Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

2. Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Dinas Pariwisata Kota Makassar mempunyai fungsi antara lain:

- 1) Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata.
- 2) Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata.
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata.
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang pariwisata.
- 5) Pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang pariwisata.
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

d. Pengelolaan dan Pemanfaatan Aplikasi Tourism Makassar Sebagai Media Komunikasi Pariwisata.

Seperti yang sudah disampaikan di bab sebelumnya bahwa salah satu media yang dimanfaatkan Dinas Pariwisata Kota Makassar dalam menyebarkan informasi kepada wisatawan / masyarakat mengenai kultur lokal, destinasi wisata dan kalender event adalah Aplikasi Tourism Makassar. Pemilihan media komunikasi jenis Aplikasi ini dikarenakan Dinas Pariwisata Kota Makassar menyadari di era digital saat ini wisatawan ataupun masyarakat sudah aktif mengenai perkembangan teknologi informasi dan aplikasi yang dianggap mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat untuk mengaksesnya. Alasan inilah yang melatarbelakangi Dinas Pariwisata Kota Makassar berupaya memanfaatkan aplikasi Tourism Makassar sebagai media informasi & komunikasi tentang kepariwisataan di Kota Makassar. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Muhammad Room selaku Kepala Bidang Promosi & Pemasaran.

Aplikasi Tourism Makassar merupakan aplikasi yang lahir dari pengembangan program Smart City di kota Makassar, jadi setiap SKPD di inginkan oleh bapak Walikota Makassar untuk menciptakan inovasi. Seiring dengan perkembangan jaman semuanya ada pada genggaman, jadi kita mau aplikasi Tourism Makassar menjadi digital guidance bagi para wisatawan di kota Makassar”

“Jadi Dinas Pariwisata menciptakan aplikasi dinamakan Tourism Makassar itu tersedia di Android & IOS. Itu kan jarang yah, bahkan di pemerintah di Makassar pun belum ada selain Dinas Pariwisata punya salah satunya kan”.

Pemanfaatan aplikasi ini dinilai lebih efisien dan aktual dalam memberikan informasi pariwisata dibandingkan dengan media lain seperti brosur dan media sosial, walaupun Dinas Pariwisata sendiri juga masih menyebarkan informasi melalui brosur dan media sosial yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata. Akan tetapi, Dinas Pariwisata menilai penyebaran informasi melalui aplikasi tourism makassar dapat memudahkan dan membimbing wisatawan ataupun masyarakat dengan 9 fitur berbasis digital di dalam aplikasi tersebut.

Seperti yang diungkapkan Muhammad Room Selaku Kepala Dinas Pariwisata : “jadi didalam aplikasi ada 9 fitur utama, yang terdiri dari Peta Wisata yang didalamnya adalah spot-spot wisata berdasarkan zona mapping, kemudian menu Populer yang merupakan destinasi favorit/baru, kemudian jelajah dan terbagi menjadi 6 ada kuliner, akomodasi, hiburan, belanja dan souvenir, kemudian fitur penawaran khusus produk apa yang lagi diskon, selanjutnya fitur Kultur lokal memperkenalkan budaya lokal kota Makassar, menu Kegiatan/Event: memberikan informasi seputar event-event yang ada di kota makassar. Transportasi ketika kita naik angkot sudah tau kode tujuannya berapa, ketika naik taksi kita nggak perlu repot-repot mencatat nomor lambungnya berapa, tinggal pencet panggilan

suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pembangunan kepariwisataan harus tetap memperhatikan jumlah penduduk.

Hambatan Dinas Pariwisata dalam pelaksanaan pengembangan objek wisata pantai di kota makassar, hambatan yaitu dari segi peraturan yang di buat oleh pemerintah pusat, peningkatan jumlah SDM, publikasi yang lebih detail, dilanjutkannya pembangunan infrastruktur yang mendukung pariwisata, dan penegakkan hukum.

Kebudayaan sektor pariwisata indonesia memperkenalkan kebudayaan indonesia kepada wisata asing. Jadi faktor pariwisata memiliki kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan nasional, untuk itu segala potensi yang ada di tanah air perlu dimanfaatkan dengan sebaik baiknya. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan suatu konsep atau rumusan perencanaan pengembangan kepariwisataan secara nasional (RIPPDA) Rencana Industri Pengembangan Pariwisata Daerah, regional/ propinsi, dan lokal, kota, serta kabupaten.

Bagaimana upaya Pemerintah dalam mengembangkan objek wisata tersebut tapi tidak merogoh kocek pengunjung terlalu Mada? Pihak pemerintah selalu berupaya mengembangkan objek wisata yang dimana pemerintah tidak pernah memasang harga terlalu mahal untuk masuk di dalam objek wisata. Karena dari pihak pemerinah tidak pernah terlalu membebani harga kepada masyarakat untuk memasuki objek wisata pantai.

Bagaimana upaya agar pengunjung itu tertarik untuk datang ke objek wisata pantai?

Pihak pengelola pantai selalu mempromosikan di kalangan masyarakat terkait objek pantai supaya masyarakat bisa mengetahui objek pantai tersebut sedang mengadakan promosi besar-besaran agar pantai tersebut bisa ramai di datangi oleh masyarakat dan wisatawan dari luar daerah.

Pemerintah kota makassar untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari sektor pariwisata. Pariwisata merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan wilayah regional dan nasional, karena pariwisata mencakup dan terkait dengan sektor lain seperti: kondisi politik, kamtibmas, telekomunikasi, perdagangan, dan industri serta sektor lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, RIPPDA Kota Makassar diharapkan dapat memiliki kekuatan hukum (perda) yang memiliki dasar tindakan pemerintah kota Makassar dalam mengatur, mengembangkan, dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam wilayahnya. Agar dapat diciptakan pembangunan yang Umum Tata Ruang Wilayah Kota Makassar, sehingga kedudukan RIPP Kota Makassar menjadi acuan dalam perencanaan pariwisata yang lebih detail/teknis.

Adapun beberapa indikator yang di pakai oleh peneliti dalam menyelesaikan penelitian di lapangan yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi,

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar sudah dikatakan sangat bagus karena dari pihak kantor dinas selalu mementingkan komunikasi setiap bidang yang ada di kantor masing agar berjalan dengan sesuai SOP di setiap

masing kantor dalam mewujudkan pelayanan yang bagus dikantor. Oleh karena itu masing kantor selalu mengadakan meeting disetiap bidang agar karyawan bisa berkomunikasi langsung ke wisatawan yang datang dari luar sulawesi supaya bisa menerapkan sistem komunikasi yang baik dan sopan terhadap wisatawan. Adapun jenis komunikasi dalam menunjang pengembangan obyek wisata yakni melalui:

a. Sosialisasi.

Oleh karena itu pihak Kantor Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata Kota Makassar sudah dikatakan bagus dalm mensosialisasikan objek wisata kepada pihak masyarakat. Supaya pihak masyarakat bisa mengetahui objek wisata yang belum didatangi langsung oleh masyarakat.

Berikut petikan wawancara penulis dengan SN selaku Plt Bidang Pelestarian Cagar Budaya mengatakan:

Di dalam struktur organisasi di tiap bidang sumber daya manusia terdiri berapa orang? Dalam struktur organisasi itu di tiap bidangnya rata-rata terdiri dari 8 orang masing bidang atau ruangan yang ada di kantor tersebut. (Wawancara SN tanggal 11 Mei 2022).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sumber daya manusia di dinas kebudayaan kota makassar sudah dikatakan bagus karna di setiap bidang atau ruangan diisi oleh banyak karyawan dalam melayani masyarakat yang melakukan pengurusan berkas yang penting dapat dilayani dengan cepat dan akurat.

b. Promosi.

Dari pihak kantor Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata sudah dikatakan sangat bagus karena dari pihak kantor masing selalu melakukan promosi objek wisata yang baru di buka supaya menarik minat dari masyarakat untuk datang ke

lokasi objek wisata yang baru dibuka oleh kantor Dinas masing supaya objek wisata yang baru banyak didatangi oleh masyarakat yang ada di Kota Makassar.

Berikut petikan wawancara penulis dengan SN selaku Plt Bidang Pelestarian Cagar Budaya mengatakan:

Apakah visi misi serta tujuan dinas kebudayaan dalam mengembangkan berbagai obyek wisata salah satunya kawasan obyek wisata pantai yang ada di kota makassar? Di dinas kebudayaan itu sendiri lebih mengarah atau lebih memfokuskan dalam hal pengembangan wisata budaya sedangkan dalam hal pengembangan obyek wisata pantai itu di dinas pariwisata. (Wawancara SN tanggal 11 Mei 2022).

Dari hasil hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa visi, misi dan tujuan di Dinas Kebudayaan Kota Makassar dalam mengembangkan obyek wisata sudah dikatakan bagus dalam mengembangkan suatu obyek wisata yang ada di kota makassar supaya di kenal oleh masyarakat pada umumnya.

2. Sumber Daya,

Dari pihak kantor Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata sudah dikatakan bagus dalam menyediakan sumber daya alam disetiap objek wisata supaya masing objek wisata memiliki sumber daya alam yang bagus dalam menarik minat masyarakat yang datang untuk melakukan liburan bersama keluarga. Adapun sumber daya yang dimaksud yakni:

a. Fasilitas.

Oleh karena itu dari pihak Kantor Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata Kota Makassar sudah dikatakan bagus karena dari pihak kantor masing selalu menyediakan fasilitas bagus di masing objek wisata supaya masyarakat yang datang ke objek wisata tidak merasa bosan dalam menikmati liburan bersama

keluarganya. Dari pengelola objek wisata selalu melakukan pengecekan di setiap fasilitas yang perlu di perhatikan kondisi agar fasilitas tersebut bisa di perbaiki langsung dari pusat.

Berikut petikan wawancara penulis dengan SD selaku Kepala Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata kota makassar mengatakan:

Apa tujuan kebijakan pengembangan pariwisata? Arah kebijakan pengembangan ruang pariwisata di Kota Makassar yang baik untuk diterapkan sesuai dengan konsep pengembangan umum pariwisata Makassar adalah kebijakan sistem ruang pariwisata yang terpadu. Sistem terpadu ini merupakan sistem pengelompokan daerah tujuan wisata dengan tema-tema khusus yang mana dalam kelompok tersebut terdapat fungsi-fungsi penunjang lainnya. Konsep strategi kepariwisataan secara spasial disusun dengan tujuan mengorganisasi daerah tujuan wisata agar terdistribusi secara terpadu dan saling mendukung satu sama lain. Dengan adanya daerah tujuan wisata yang terdistribusi secara terpadu akan menjadi pendorong untuk terwujudnya distribusi kunjungan wisatawan yang merata. Pembentukan ruang-ruang pariwisata yang bertema khusus dan bercirikan tertentu akan mendukung (Wawancara SD tanggal 24 maret 2022).

Dari hasil hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa tujuan kebijakan pengembangan pariwisata di kota makassar sudah dikatakan bagus karena pihak kantor dinas sudah menerapkan sebuah sistem terpadu yang dimana sistem tersebut bisa mengontrol semua objek yang banyak didatangi oleh masyarakat umum agar menjaga keamanan bagi pengunjung wisata.

b. Kewenangan.

Oleh karena itu pihak kantor Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata Kota Makassar sudah dikatakan bagus dalam menjaga kewenangan disetiap objek wisata supaya berjalan dengan sesuai kesempatan bersama dalam merawat dan menjaga objek wisata lebih maju untuk kedepannya. Dari kantor dinas selalu

berkomunikasi langsung kepada pemerintah pusat supaya bisa mengembangkan bersama suatu objek wisata yang ada di kota makassar.

Berikut petikan wawancara penulis dengan SD selaku Kepala Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata kota makassar mengatakan:

Apa dasar dan pedoman kebijakan dalam pengembangan pariwisata? Jadi sebenarnya semua kebijakan pengembangan pariwisata itu ada undang undang yang mengatur yang pertama pp 50 Tahun 2011 tentang Beparnas rencana induk pengembangan pariwisata nasional kemudian turun lagi namanya Beparda provinsi rencana induk pengembangan pariwisata provinsi iu pasti memuat juga makassar yang terakhir rencana induk pengembangan prosedur daerah khusus kota makassar selain itu, beparda ada juga yang perlu dipertimbangkan namanya RTRW (rencana tata ruang wilayah kota makassar) disitu kemudian digambarkan dimana zona zona pengembangan pariwisata contoh zona pengembangan ekowisata di lantea lantepurakkan zona pengelolaan ekowisata pantai akkarena, tanjung bayang, pantai bira dan semacamnya di situlah ditentukan zona zona ekowisata pantai yang kedua dasar kebijakan beparda dan RTRW itulah yang menjadi acuan bagi dinas pariwisata untuk melaksanakan pengembangan pengembangan yang tentu saja yang selaras dengan visi misi walikota. (Wawancara SD tanggal 24 maret 2022)

Dari hasil hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pedoman kebijakan dalam pengembangan pariwisata di kota makassar sudah dikatakan bagus karena pihak kantor dinas sudah menerapkan peraturan yang sudah di sahkan langsung oleh pihak pemerintah pusat dalam melakukan pengembangan pariwisata di kota makassar dalm meningkatkan obyek wisata di kalangan masyarakat umum.

Apa yang dilakukan dalam pembangunan destinasi pariwisata di objek wisata Pantai Akkarena? Pariwisata dapat menjadi sarana dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui gerakan atau usaha-usaha yang lebih nyata. Salah satu usaha yang dilakukan adalah melalui penerapan konsep-konsep pariwisata berkelanjutan. pentingnya kepuasan pelanggan untuk bisnis pariwisata dan kebutuhan untuk upaya yang dapat dilakukan dalam rangka memenuhi harapan pelanggan. Ini berarti bahwa memuaskan harapan wisatawan dengan meningkatkan standar keramahan dan kualitas layanan pariwisata dapat membayar kembalihalmenyebarkan

Words of Positif Mouthbagi pelanggan potensial, yang, pada gilirannya, adalah biaya yang efektif dan lebih dapat diandalkan dibandingkan jenis lain dari iklan. (Wawancara SD tanggal 24 maret 2022).

Dari hasil hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pembangunan destinasi pariwisata di kota makassar sudah dikatakan bagus karna pihak dinas pariwisata di kota makassar sudah menerapkan konsep pariwisata modern dengan menggunakan suatu sistem pariwisata yang modern untuk mengembangkan suatu obyek yang berkembang.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

a. Penerapan Staf Dan Sikap.

Oleh karena itu pihak kantor Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata Kota Makassar sudah dikatakan bagus karena setiap kantor masing pegawai sudah diberikan pelatihan tentang kebijakan pengembangan wisata yang ada di kota makassar. Supaya pegawai tersebut bisa menerapkan ilmu yang diberikan langsung dari kantor dan bisa berjalan dengan keinginan dari kantor pusat setiap pegawai diberikan tugas untuk menghendel semua kegiatan yang ada disuatu objek wisata supaya berjalan dengan rapi dan sesuai dengan program yang sudah berlakukan oleh pihak kantor dinas.

Berikut petikan wawancara penulis dengan SD selaku Kepala Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata kota makassar mengatakan:

Bagaimana komunikasi dan koordinasi antara Dinas Pariwisata dengan instansi lain apakah sudah berjalan dengan baik? Koordinasi merupakan suatu usaha yang penting dilakukan dalam meningkatkan efektivitas, efesiensi dan produktifitas kerja untuk mewujudkan tujuan secara optimal. Tanpa koordinasi yang baik dalam lembaga akan sulit untuk dapat tercapainya keteraturan kegiatan dengan tertib dalam upaya untuk meraih tujuan yang hendak dicapai oleh lembaga tersebut. Peningkatan koordinasi diperlukan supaya dalam pencapaian tujuan

organisasi akan berjalan dengan lebih lancar dan lebih efektif dan lebih efisien dibandingkan sebelumnya. (Wawancara SD tanggal 24 maret 2022).

Dari hasil hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa komunikasi dan koordinasi antara Dinas Pariwisata dengan Instansi lain sudah dikatakan bagus karena pihak kantor Dinas Pariwisata kota makassar sudah berjalan dengan baik dalam meningkatkan produktivitas kerja di setiap bidang yang ada di kantor Dinas Pariwisata Kota Makassar dalam mengembangkan suatu obyek wisata yang berkembang dan maju di kalangan masyarakat umum.

b. Pengangkatan birokrasi

Dari pihak masing kantor dinas sudah dikatakan bagus karena pengangkatan birokrasi setiap masing kantor menerapkan suatu sistem dalam, mengangkat birokrasi terlebih dahulu mengadakan suatu pelatihan dan diklat setiap masing karyawan yang mau naik jabatan birokrasi yang ada di kantor supaya karyawan bisa diketahui kemampuan dan keterampilan yang dimiliki masing pegawai.

Berikut petikan wawancara penulis dengan SD selaku Kepala Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata kota makassar mengatakan:

Apakah ada pendidikan dan pelatihan (diklat) yang diberikan kepada pegawai untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka pengembangan pariwisata? Dalam hal pendidikan maupun pelatihan yang diberikan kepada pegawai tentunya ada agar dapat meningkatkan baik dari segi pengetahuan maupun kualitas agar terciptanya SDM yang unggul dalam bidangnya masing masing (Wawancara SD tanggal 24 maret 2022).

Dari hasil hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pendidikan dan pelatihan yang ada di kantor Dinas Pariwisata di Kota Makassar sudah dikatakan bagus karena pihak kantor Dinas selalu melakukan pendidikan dan pelatihan di setiap bidang supaya karyawan di kantor tersebut bisa mengembangkan

pengetahuan, skill, dan keterampilan dalam melayani masyarakat yang datang berwisata.

c. Insentif

Oleh karena itu pihak setiap masing kantor sudah dikatakan bagus karena pihak atasan langsung memberikan insentif kepada bawahannya supaya karyawan merasa terdorong atas pemberian insentif langsung dari atasannya. Pihak kantor dinas itu sendiri memberikan insentif supaya karyawan lebih semangat lagi dalam bekerja dan mengembangkan suatu objek wisata yang ada di kota makassar.

Berikut petikan wawancara penulis dengan SD selaku Kepala Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata kota makassar mengatakan:

Siapa saja yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata? Para pengawai dinas pariwisata yang khusus di bidangnya masing masing Majunya suatu wisata tentu tidak lepas dari sumber daya yang sangat berkompeten di dalamnya Sumber daya yang dimaksud terbagi 4 bagian yaitu staf, informasi, kewenangan dan fasilitas. Staf dalam konteks penelitian ini adalah staf dari dinas pariwisata yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan pengembangan objek wisata. (Wawancara SD tanggal 24 maret 2022).

Dari hasil hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di kota makassar sudah dikatakan bagus karna setiap bidang yang ada di kantor dinas selalu berpartisipasi dalam mengembangkan suatu obyek wisata supaya bisa dikenal oleh kalangan masyarakat umum.

Tabel 4.5
Sarana Dan prasarana Pantai Akkarena

No.	Nama Sarana Dan Prasarana Pantai Akkarena	Keterangan
1.	Area Parkir	Bagus
2.	Kamar Mandi	Bagus
3.	Kamar Ganti dan Kamar Bilas	Bagus
4.	Ruang Meeting	Bagus
5.	Gazebo	Bagus
6.	Spot Selfie	Bagus
7.	Penginapan	Bagus

Sumber: Pantai Akkarena

Berdasarkan data diatas bahwa sarana dan prasarana yang ada di pantai Akkarena sudah dikatakan bagus karena pihak pengelolaan pantai selalu mengecek keadaan tempat wisata supaya kalau ada tempat yang rusak bisa pihak pengelolaan pantai bisa diperbaiki tempat yang membutuhkan perbaikan tempat.

Tabel 4.6
Nama-nama Pegawai Dinas Pariwisata Kota Makassar

No.	Nama-nama Karyawan	Golongan	Jabatan
1.	Muhammad Roem, S.STP, M.S.i	IV a	Kepala DINAS
2.	Andi Tenri Lengka, S.H, M.Si	IV a	Sekretaris Dinas Pariwisata
3.	Husyadi Syahputra, S.Kom	III a	Kasubag Umum & Kepegawaian
4.	Yuliana	II d	Analisis Sistem Informasi Sub Bagian Umum & Kepegawaian
5.	Ismayani Taiyeb	II d	Pengadministrasi Persuratan Sub Bagian Umum & Kepegawaian
6.	Yulianti, S.E	IV a	Pengadministrasi Persuratan Sub Bagian Umum & Kepegawaian
7.	Nurmiati, S.E	III b	Kepala Sub Bagian Keuangan
8.	Sitti Khadijah, S.E, M.Si	III b	Penata Keuangan Sub Bagian Keuangan
9.	Syamsuddin S, S.E	III a	Penata Keuangan Sub Bagian Keuangan
10.	HJ. Hartati, S.E, A.K, M.Si	IV a	Pengelola Keuangan Sub Bagian Keuangan
11.	Sitti Arafah, S.E	III d	Kepala Sub Bagian Perencanaan & Pelaporan
12.	Mulyono	III b	Analisis Rencana Program & Kegiatan Sub Bagian Perencanaan & Pelaporan
13.	Kartini Cita, S.E	III d	Analisis Laporan Akuntabilitas Sub Bagian Perencanaan & Pelaporan

14.	Heriyanto Ismail, S.E	III b	Analisis Laporan Akuntabilitas Sub Bagian Perencanaan & Pelaporan
15.	Andi Irdan Pandita, S.STP, M.Si	IV a	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif
16.	Muliany Rosa Arifin, S.S, M.AP	III d	Adyatama Kepariwisatawan Dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
17.	Nelly, S.S	III d	Penyusunan Rencana Promosi
18.	Rosniah, S.Sos, M.M	IV a	Adyatama Kepariwisatawan Dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
19.	Irwin Ramadhanis Ohorella, A.Md	III a	Penyusunan Rencana Promosi
20.	Nuraidar Anwar, S.E, M.M	III a	Penyusun Rencana Promosi
21.	Muhammad Iwan	III b	Penyusun Rencana Promosi
22.	Rini Tenrisau, S.ST, P.AR	III d	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi & Industri Pariwisata
23.	Andi Amanah, S.E	III b	Adyatama Kepariwisatawan Dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
24.	Drs. Andi Karunrung, M.Si	Iva	Analisis Objek Wisata
25.	Safaruddin, S.S	III d	Analisis Objek Wisata
26.	Wirsani, S.S	III d	Pengelola Data
27.	Khairil Amri, S.S	III a	Pengadministrasi Umum
28.	Saldy Zulharman, A.Md. P.ar	II b	Adyatama Kepariwisatawan Dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
29.	A. Hazafir	IV a	Pengawasan Kepariwisatawan
30.	Amir Mustafa, S.S	III d	Pengawasan Kepariwisatawan
31.	Marini Bunga Bathara	III d	Pengawasan Kepariwisatawan
32.	Fitriyani. S	III d	Pengawasan Kepariwisatawan
33.	Hendra Hamzah	III a	Pengadministrasi Umum
34.	Rama Pratama, A.Ma	III a	Adyatama Kepariwisatawan Dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
35.	Dra. Rini Ariani Arifin	III d	Penyuluh Wisata
36.	Ilham Halik Sulaiman	III a	Penyuluh Wisata
37.	Supriadi	III d	Pengawas Kepariwisatawan Bidang Pengembangan Destinasi & Industri Pariwisata
38.	Hj. Irma Azikin, S.E, M.Si	IV a	Adyatama Kepariwisatawan Dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
39.	Sukmawati, A.Md	III a	Pengelola Usaha Pemasaran & Promosi Wisata
40.	Arnila Astuti Halim, A.Md	III a	Pengelola Usaha Pemasaran & Promosi Wisata

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Makassar

Berdasarkan data diatas bahwa Nama-nama Pegawai Dinas Pariwisata Kota Makassar pihak kantor Dinas selalu melakukan rekrut pegawai sesuai dengan

bidang yang masih kurang sumber daya manusia supaya bisa melayani masyarakat dengan cepat tanpa perlu menunggu lama lagi dalam mengurus berkas penting.

4. Struktur Birokrasi.

Oleh karena itu dari pihak kantor dinas sudah dikatakan bagus karena struktur birokrasi yang ada di masing kantor dinas sudah menerapkan struktur birokrasi yang sudah ditetapkan langsung dari kantor pusat. Agar struktur birokrasi di masing kantor bisa berjalan dengan baik sesuai kebijakan untuk mengembangkan suatu objek wisata yang ada di kota makassar.

Berikut petikan wawancara penulis dengan DA selaku Wisatawan Pantai Akkarena mengatakan:

Apakah bapak/ibu setuju dan mendukung dengan adanya pengembangan pariwisata? Menurut saya sendiri tentu saya setuju selama itu bernilai positif dan tidak mengganggu maupun merusak saya rasa sah sah saja. (Wawancara DA tanggal 24 maret 2022).

Dari hasil hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat mendukung dengan adanya pengembangan pariwisata di kota makassar sudah dikatakan bagus karna masyarakat selalu mendukung pembangunan tempat wisata agar Kota Makassar bisa berkembang dan maju di luar sulawesi supaya di kunjungi banyak wisata di luar daerah.

Apakah bapak/ibu bangga dengan adanya pengembangan pariwisata ini? Tentunya bangga dikarenakan wisata wisata yang ada di makassar bisa dikenal oleh banyakorang dan khalayak umum baik itu dalam maupun luar daerah sulawesi selatan. (Wawancara DA tanggal 24 maret 2022).

Dari hasil hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pengembangan pariwisata di kota makassar sudah dikatakan bagus karena banyak masyarakat yang mengetahui tempat obyek wisata yang paling banyak di datangi oleh wisatawan dari daerah.

Apa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya kebijakan pengembangan pariwisata? Salah satu dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya kebijakan pengembangan pariwisata ini yakni pengelolaan dan penataan obyek wisata jauh lebih baik dari sebelumnya dan lebih tertata. (Wawancara DA tanggal 24 maret 2022).

Dari hasil hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kebijakan pengembangan pariwisata di kota makassar sudah dikatakan bagus karena pihak pemerintah selalu berupaya dalam pembangunan obyek wisata di Kota Makassar berjalan dengan lancar tanpa ada kendala yang dirasakan sama sekali.

Berikut petikan wawancara penulis dengan NI selaku Wisatawan Pantai Akkarena mengatakan:

Bagaimana upaya pengelola pantai Akkarena dalam mensosialisasikan wisata pantai Akkarena agar diketahui kepada calon pengunjung dari dalam maupun luar daerah ? Yakni dengan bekerja sama dengan instansi lain serta melibatkan semua pihak yang dianggap berperan penting dalam hal mempromosikan obyek wisata agar lebih dikenal masyarakat salah satu caranya yaitu dengan membuat iklan di berbagai situs internet. (Wawancara NI tanggal 29 maret 2022).

Dari hasil hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pengelolaan pantai Akkarena di Kota Makassar sudah dikatakan bagus karena pihak pengelolaan pantai selalu berupaya dalam menjaga kebersihan dan menjaga kenyamanan bagi masyarakat yang datang untuk melakukan mandi bersama keluarga bisa terjaga dengan aman tanpa penuh rasa ragu untuk melakukan mandi dilaut.

Menurut bapak/ ibu Bagaimana usaha yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selama ini dalam pelatihan dan pendampingan yang dilakukan pada masyarakat dan pengelola wisata pantai? Dengan terjun langsung kelapangan untuk melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat. (Wawancara NI tanggal 29 maret 2022).

Dari hasil hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melakukan pelatihan dan pendampingan pada masyarakat sudah dikatakan bagus karena piha kantor dinas tersebut selalu melakukan pelatihan dan pendampingan di setiap karyawan agar bisa berjalan dengan lancar dengan sesuai standar SOP di masing kantor Dinas dalam upaya menjaga pelayanan prima terhadap masyarakat yang datang berwisata

Sarana dan prasarana apa saja yang telah diberikan baik itu dari Dinas Kebudayaan dan pariwisata maupun dari pihak pengelola di wisata pantai Akkarena? Sarana dan prasarana yang diberikan berupa berbagai wahana serta fasilitas fasilitas lainnya dalam mengembangkan obyek wisata serta sebagai daya tarik bagi wisatawan agar datang berkunjung. (Wawancara NI tanggal 29 maret 2022).

Dari hasil hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana di pantai Akkarena sudah dikatakan bagus karen pihak pengelolaan pantai Akkarena selalu mengecek fasilitas yang rusak atau yang perlu di perbaiki fasilitas dalam menjaga kenyamanan bagi masyarakat yang datang berkunjung

Tabel 4.7
Sarana Dan Prasarana di Pantai Akkarena Kota Makassar

No.	Nama Sarana Dan Prasarana Dinas Pariwisata	Keterangan
1.	<i>Travel agent</i>	Sangat Bagus
2.	<i>Tour operator</i>	Sangat Bagus
3.	Rumah Makan	Sangat Bagus
4.	Akomodasi	Sangat Bagus
5.	Angkutan Wisata	Sangat Bagus
6.	Objek Wisata	Sangat Bagus
7.	Atraksi Wisata	Sangat Bagus
8.	Air bersih	Sangat Bagus
9.	Persediaan Air Minum	Sangat Bagus
10.	Toilet	Sangat Bagus
11.	Mushola	Sangat Bagus

Sumber: Pantai Akkarena Kota Makassar

Berdasarkan data diatas bahwa sarana dan prasarana Dinas Pariwisata Kota Makassar sudah dikatakan bagus karena pihak kantor dinas selalu mengecek semua tempat yang ada di tempat wisata supaya sarana dan prasarana yang ada di tempat wisata selalu kelihatan bagus dan bersih oleh karena itu pihak dari kantor dinas selalu datang ke lokasi wisata untuk mengecek keadaan tempat wisata yang dibutuhkan perbaikan sarana dan prasarana yang rusak atau perlu di perbaiki.

Berikut petikan wawancara penulis dengan RA selaku Wisatawan Pantai Akkarena mengatakan:

Apa tujuan anda berkunjung ke Objek Wisata Pantai Akkarena? Tujuan saya datang di pantai akkarena salah satunya ingin menikmati berbagai kuliner yang dijajakan serta ingin menikmati sunset di sore hari di pantai ini. (Wawancara RA tanggal 29 maret 2022).

Dari hasil hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa tujuan anda berkunjung ke Objek Wisata Pantai Akkarena sudah dikatakan bagus karena banyak masyarakat yang berkunjung ke Objek Wisata Akkarena jadi masyarakat banyak mengetahui objek wisata yang ada di kota Makassar.

Bagaimana anda mengetahui Objek Wisata Pantai Akkarena? Dari teman serta melihat di internet juga jadi Objek Pantai Akkarena itu sendiri sudah banyak dikenal oleh kalangan masyarakat. (Wawancara RA tanggal 29 maret 2022).

Dari hasil hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Objek Wisata Pantai Akkarena sudah dikatakan bagus karena pihak pengelolaan pantai Akkarena setiap saat bersosialisasi di kalangan masyarakat supaya tempat wisata bisa dikenal dari luar sulawesi.

Bagaimana menurut anda kemudahan dalam menjangkau (aksesibilitas) ke lokasi wisata ini? Cukup mudah dikarenakan letaknya yang strategis, mudah di jangkau serta jarak yang tidak terlalu jauh dari pusat kota. (Wawancara RA tanggal 29 maret 2022).

Dari hasil hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kemudahan dalam menjangkau Objek Pantai Akkarena sudah dikatakan bagus karena lokasi Pantai Akkarena sangat strategi di tengah kota Makassar jadi masyarakat yang mau ke lokasi bisa dengan mudah di dapatkan tempat tanpa susah lagi mencari alamat objek tersebut.

Berikut petikan wawancara penulis dengan HI selaku masyarakat umum mengatakan:

Menurut bapak / ibu terkait pembangunan obyek wisata pantai akkarena ini? Kalau dari saya pribadi terkait pembangunan obyek wisata ini cukup baik dan masyarakat pun setuju dan setuju karena unturnya tidak merugikan masyarakat melainkan menguntungkan dalam hal berdagang di sekitaran pantai ini. (Wawancara HI tanggal 29 maret 2022).

Dari hasil hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pembangunan objek wisata pantai Akkarena di Kota Makassar sudah dikatakan bagus karena pihak pemerintah pusat selalu mengupayakan pembangunan tempat wisata supaya masyarakat yang ada di kota makassar tidak mesti lagi pergi liburan bersama ke

tempat jauh jadi pihak pemerintah pusat selalu membangun tempat rekreasi yang begitu indah dan menarik untuk dikunjungi oleh masyarakat.

Menurut bapak/ ibu bagaimana dengan pelayanan serta penyediaan fasilitas bagi para pedagang di pantai ini sudah cukup memadai? Saya rasa sudah cukup baik atau sudah lebih dari yang kami butuhkan pada saat ini, menurut saya pribadi itu sudah merasa baik dalam pelayanan yang diberikan oleh tempat wisata. (Wawancara HI tanggal 29 maret 2022).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa penyediaan fasilitas masing tempat wisata sudah dikatakan bagus karena pihak masing pengelolaan tempat wisata selalu mengecek fasilitas yang perlu untuk diperbaiki dan perlu diperbaharui lagi fasilitas yang sudah lama menjadi fasilitas modern, agar masyarakat tidak merasa bosan dalam berkunjung ke tempat wisata yang ada di kota makassar.

Tabel 4.8
Sarana Dan Prasarana Wisata Kuliner Di Pantai Akkarena

No.	Nama Sarana Dan Prasarana Wisata Kuliner	Keterangan
1.	<i>Yess Cafe</i>	Sangat Bagus
2.	<i>Cafe Frozen</i>	Sangat Bagus
3.	Warung Ceria	Sangat Bagus
4.	Cafe On The Beach	Sangat Bagus

Sumber: Pantai Akkarena Kota Makassar

Berdasarkan data diatas bahwa sarana dan prasarana wisata kuliner di pantai akkarena sudah dikatakan bagus karena pihak pengelola pantai menyediakan wisata kuliner bagi wisatawan yang datang berlibur, agar wisatawan tidak mencari lagi makanan di lokasi pantai dan harga makanan di pantai akkarena pun juga tidak terlalu mahal sesuai dengan budget para pengunjung yang datang berlibur.

C. Pembahasan Penelitian

Pertimbangan dalam pembahasan penelitian saya dalam teori Mulyono Yalia, (2014) menjelaskan tentang implementasi kebijakan pengembangan dan pemberdayaan lembaga sosial sesuai dengan pembahasan dalam skripsi yang dimana pembahasan itu mengenai pengembangan obyek wisata di pantai dalam teori tersebut sama dengan permasalahan dengan judul skripsi saya jadi saya sudah berdiskusi untuk mengambil teori mulyano dalam mengamati suatu instansi di lokasi penelitian saya dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi.

1. Komunikasi,

Pada umumnya diartikan sebagai hubungan atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah hubungan, atau diartikan pula sebagai saling tukat-menukar pendapat. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar sudah dikatakan sangat bagus karena dari pihak kantor dinas selalu mementingkan komunikasi setiap bidang yang ada di kantor masing agar berjalan dengan sesuai SOP disetiap masing kantor dalam mewujudkan pelayanan yang bagus dikantor. Oleh karena itu masing kantor selalu mengadakan meeting disetiap bidang agar karyawan bisa berkomunikasi langsung ke wisatawan yang datang dari luar sulawesi supaya bisa menerapkan sistem komunikasi yang baik dan sopan terhadap wisatawan. Adapun jenis komunikasi dalam menunjang pengembangan obyek wisata yakni melalui

a. Sosialisasi

Sosialisasi ini bertujuan menyebarluaskan informasi kepada publik serta menambah wawasan pengetahuan bagi bertujuan agar masyarakat paham dan mengerti tentang pentingnya aspek pariwisata dikembangkan dalam meningkatkan ekonomi daerah. Oleh karena itu pihak Kantor Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata Kota Makassar sudah dikatakan bagus dalam mensosialisasikan objek wisata kepada pihak masyarakat. Supaya pihak masyarakat bisa mengetahui objek wisata yang belum didatangi langsung oleh masyarakat.

b. Promosi

Strategi promosi dalam sektor pariwisata penting dilakukan karena sektor pariwisata merupakan industri yang terus berkembang pesat dan persaingan akan semakin ketat, sehingga strategi promosi pariwisata memiliki peran yang sangat besar. Dari pihak kantor Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata sudah dikatakan sangat bagus karena dari pihak kantor masing selalu melakukan promosi objek wisata yang baru di buka supaya menarik minat dari masyarakat untuk datang ke lokasi objek wisata yang baru dibuka oleh kantor Dinas masing supaya objek wisata yang baru banyak didatangi oleh masyarakat yang ada di Kota Makassar.

2. Sumber Daya

Merupakan segala sesuatu yang memainkan peran penting dalam menarik wisatawan untuk mempelajari kawasan termasuk di dalamnya sumber daya alam, kepariwisataan fasilitas rekreasi, dan daya tarik wisata. Dari pihak kantor Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata sudah dikatakan bagus dalam menyediakan sumber daya alam disetiap objek wisata supaya masing objek wisata memiliki

sumber daya alam yang bagus dalam menarik minat masyarakat yang datang untuk melakukan liburan bersama keluarga. Adapun sumber daya yang dimaksud yakni:

a. Fasilitas

Fasilitas wisata merupakan pelayanan pendukung yang dapat dimanfaatkan wisatawan dengan menawarkan mutu dan harga yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan dengan komponen seperti atraksi, akomodasi, kegiatan wisata, interpretasi maupun perencanaan manajemen. Oleh karena itu dari pihak Kantor Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata Kota Makassar sudah dikatakan bagus karena dari pihak kantor masing selalu menyediakan fasilitas bagus di masing objek wisata supaya masyarakat yang datang ke objek wisata tidak merasa bosan dalam menikmati liburan bersama keluarganya. Dari pengelola objek wisata selalu melakukan pengecekan di setiap fasilitas yang perlu di perhatikan kondisi agar fasilitas tersebut bisa di perbaiki langsung dari pusat.

b. Kewenangan

Di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ini, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain berkaitan erat dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintah atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Setiap daerah dapat menggali potensi yang bisa dikembangkan, sehingga perkembangan masing-masing daerah dapat meningkat pesat. terdapat berbagai sektor yang dapat dikembangkan, diantaranya adalah sektor perdagangan, sektor jasa, sektor pertanian, sektor pariwisata dan lain-lain. Oleh karena itu pihak kantor Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata

Kota Makassar sudah dikatakan bagus dalam menjaga kewenangan disetiap objek wisata supaya berjalan dengan sesuai kesempatan bersama dalam merawat dan menjaga objek wisata lebih maju untuk kedepannya. Dari kantor dinas selalu berkomunikasi langsung kepada pemerintah pusat supaya bisa mengembangkan bersama suatu objek wisata yang ada di kota makassar.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

a. Penerapan Staf Dan Sikap.

Oleh karena itu pihak kantor Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata Kota Makassar sudah dikatakan bagus karena setiap kantor masing pegawai sudah diberikan pelatihan tentang kebijakan pengembangan wisata yang ada di kota makassar. Supaya pegawai tersebut bisa menerapkan ilmu yang diberikan langsung dari kantor dan bisa berjalan dengan keinginan dari kantor pusat setiap pegawai diberikan tugas untuk menghendel semua kegiatan yang ada disuatu objek wisata supaya berjalan dengan rapi dan sesuai dengan program yang sudah berlakukan oleh pihak kantor dinas.

b. Pengangkatan birokrasi

Dari setiap masing kantor dinas sudah dikatakan bagus karena pengangkatan birokrasi setiap masing kantor menerapkan suatu sistem dalam, mengangkat birokrasi terlebih dahulu mengadakan suatu pelatihan dan diklat setiap masing karyawan yang mau naik jabatan birokrasi yang ada di kantor supaya karyawan bisa diketahui kemampuan dan keterampilan yang dimiliki masing pegawai.

c. Insentif

Oleh karena itu pihak setiap masing kantor sudah dikatakan bagus karena pihak atasan langsung memberikan insentif kepada bawahannya supaya karyawan merasa terdorong atas pemberian insentif langsung dari atasannya. Pihak kantor dinas itu sendiri memberikan insentif supaya karyawan lebih semangat lagi dalam bekerja dan mengembangkan suatu objek wisata yang ada di kota makassar.

4. Struktur Birokrasi.

Oleh karena itu dari pihak kantor dinas sudah dikatakan bagus karena struktur birokrasi yang ada di masing kantor dinas sudah menerapkan struktur birokrasi yang sudah ditetapkan langsung dari kantor pusat. Agar struktur birokrasi di masing kantor bisa berjalan dengan baik sesuai kebijakan untuk mengembangkan suatu objek wisata yang ada di kota makassar

BAB V

KESIMPULAN

A. Simpulan

Adapun simpulan dari penelitian ini dilakukan di lapangan tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Obyek Wisata Pantai Pada Dinas Pariwisata Di Kota Makassar.

1. Komunikasi,

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar sudah dikatakan sangat bagus karena dari pihak kantor dinas selalu mementingkan komunikasi setiap bidang yang ada di kantor masing agar berjalan dengan sesuai SOP disetiap masing kantor dalam mewujudkan pelayanan yang bagus dikantor. Oleh karena itu masing kantor selalu mengadakan meeting disetiap bidang agar karyawan bisa berkomunikasi langsung ke wisatawan yang datang dari luar sulawesi supaya bisa menerapkan sistem komunikasi yang baik dan sopan terhadap wisatawan.

2. Sumber Daya

Dari pihak kantor Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata sudah dikatakan bagus dalam menyediakan sumber daya alam disetiap objek wisata supaya masing objek wisata memiliki sumber daya alam yang bagus dalam menarik minat masyarakat yang datang untuk melakukan liburan bersama keluarga.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Oleh karena itu pihak kantor Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata Kota Makassar sudah dikatakan bagus karena setiap kantor masing pegawai sudah diberikan pelatihan tentang kebijakan pengembangan wisata yang ada di kota

makassar. Supaya pegawai tersebut bisa menerapkan ilmu yang diberikan langsung dari kantor dan bisa berjalan dengan keinginan dari kantor pusat setiap pegawai diberikan tugas untuk menghendel semua kegiatan yang ada disuatu objek wisata supaya berjalan dengan rapi dan sesuai dengan program yang sudah berlakukan oleh pihak kantor dinas.

4. Struktur Birokrasi.

Oleh karena itu dari pihak kantor dinas sudah dikatakan bagus karena struktur birokrasi yang ada di masing kantor dinas sudah menerapkan struktur birokrasi yang sudah ditetapkan langsung dari kantor pusat. Agar struktur birokrasi di masing kantor bisa berjalan dengan baik sesuai kebijakan untuk mengembangkan suatu objek wisata yang ada di kota makassar.

B. Saran

Berdasarkan Simpulan yang dikemukakan di atas, maka penulis memberikan saran atau masukan sebagai berikut:

1. Dinas Pariwisata untuk kedepannya agar pelayanan di sana agar lebih di tingkatkan lagi serta hal hal yang terkait dengan peningkatan pembangunan pariwisata, serta pemerataan pembangunan berbagai destinasi di makassar lebih di perhatikan lagi
2. Dinas Kebudayaan agar lebih di tingkatkan lagi baik itu dari segi kualitas pegawainnya, kinerjanya terhadap masyarakat agar kedepannya bisa menjadikan wisata yang ada di makassar menjadi wisata yang mendunia di bidangnya

DAFTAR PUSTAKA

- A.K.M. (2013).Studi Pengelolaan Objek Wisata Pantai Akkarena sebagai Sarana Rekreasi Bagi Masyarakat Kota Makassar Abstrak.Journal Of *CheminalInformation And Modeling*, 53(9),1689-1699.
- A. Kahar Muzakkar (2019). Studi Pengelolaan Obyek Wisata Pantai Akkarena Sebagai Sarana Rekreasi Bagi Masyarakat Kota Makassar
- Damara, G. H., M.Yusup, P., & A, R. K. (2014). Perilaku Pencarian Informasi Pariwisata Para Wisatawan Domestik Di Rumah Mode. *Jurnal Kajian Informasi Dan Perpustakaan*, 2(1), 27.
<https://doi.org/10.24198/jkip.v2i1.11621>
- G.A. Kristha A. Indraningsih. (2019). Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Kota Palu Implementation of Tourism Development Policy Palu City. *Pariwisata Parama*, 1(1), 31–41.
- Gokovali,U.,& Bahar, O. (2006). Contribution of tourism to economic growth: A Panel data approach. *Anatolia*, 17 (2) , 155-162.
- Irawan E, (2015). Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Banyuwangi.*Jurnal Ejaring Administrasi Publik*, 7 (2), 757-770.
- Narendra, A. N., Habsari, S. K., & Ardianto, D. T. (2019). Kepemilikan Serta Pembentukan Modal Sosial Oleh Wisatawan Dalam Memilih House Of Sampoerna Sebagai Daya Tarik Wisata. *Pariwisata Pesona*, 04(1), 1–10.
- Nurhayati. (2014). *Analisis Investasi Sektor Pariwisata Oleh Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nurhayati Dosen Tetap Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Kepulauan Riau (UNRIKA)*.
- Nasution,R.H, Avenzora, R,& Sunarminto,T. (2018).Analisis Kebijakan Peraturan Perundang-Undangan Ekowisata Di Indonesia (TheAnaliysisEcotourismLaws And Policies In Indonesia). 23(1), 9-17.
- Rusyidi, B., & Fedryansah, M. (2018). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat.*Jurnal Destinasi Pariwisata*, 5(1), 144.<https://doi.org/10.24843/jdepar.2017.v05.i01.p26>
- Silitonga, S. S. M., & Anom, I. P. (2016). Kota Tua Barus Sebagai Daerah Tujuan Wisata Sejarah Di Kabupaten Tapanuli Tengah. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 4(2), 7–13.
- Stih, L. A. S. (2018). Peran Investasi Dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi Bidang Pariwisata Di Provinsi Sumatera Barat Role. *ISSN 2502-3632*

(Online) ISSN 2356-0304 (Paper) *Jurnal Online Internasional & Nasional* Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 53(9), 1689–1699. www.journal.uta45jakarta.ac.id

Sutanto, S. A., & Lubis, A. (2019). Sistem Informasi Pariwisata Berbasis Web Pada Awan Tour Travel. *Jurnal Teknik Informatika*, 14(1), 15–20. <https://doi.org/10.35793/jti.14.1.2019.23780>

Soebagyo. 2012. "Strategi Pengembangan Pariwisata di Indonesia ", *Jurnal Liquidity* Vol1 No.2. Diakses Pada hari Selasa, 22 April 2019. [https://scholar.google.co.id/scholar?q=soebagyo+2012+pengaruh+strategi&hl=id&ass=1&oi=scholar#d=gs_qabs&u=%23p%3D3yPTFA ANgj](https://scholar.google.co.id/scholar?q=soebagyo+2012+pengaruh+strategi&hl=id&ass=1&oi=scholar#d=gs_qabs&u=%23p%3D3yPTFA%20ANgj).

Sumerta, I.K.E. (2018). Perhotelan Dan Pariwisata Susunan. 8(1)

Spillane, j.j. (2001) Ekonomi Pariwisata. Jakarta: Penerbit Kanisius.

Umar, Z. (2017). Jurnal Analisis dan Kebijakan Publik. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 3(1), 1–13.

Puspawati D.P.H., & Ristanto. (2018). Strategi Promosi Digital Untuk Pengembangan Pariwisata Kota Magelang Desak. I (2), 1-20.

Yoeti A Oka, 2001. Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung, Angkasa. Perundang-Undangan: Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Di Sulawesi Selatan

Djabbari, M. H., Alwi, & Tamrin, S. H. (2021). Implementasi Public Private Partnership dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Toraja Utara. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 7(1), 1–13. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/13203>

Yalia, M. (2014). Implementasi Kebijakan Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Media Tradisional Di Jawa Barat (The Implementations Of Development And Empowerment Of Traditional Social Media In West Java). *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 6(1), 149. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v6i1.191>



LAMPIRAN 1

1. Lampiran Surat Izin Dari Kampus


**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp 866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail : lp3munimuh@plata.com



Nomor : 321/05/C.4-VIII/II/43/2022

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPM D Prov. Sul-Sel

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0139/FSP/A.6-VIII/II/1443H/2022M tanggal 9 Februari 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : A. DIANINDARWATI

No. Stambuk : 10561 1103017

Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Pantai pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Makassar"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 14 Februari 2022 s/d 14 April 2022.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. H. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716

2. Lampiran Surat Izin Dari Ktsp



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 26615/S.01/PTSP/2022
 Lampiran :
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 321/05/C.4-VIII/II/43/2022 tanggal 09 Februari 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : A.DIANINDARWATI
 Nomor Pokok : 105611103017
 Program Studi : Ilmu Adm. Negara
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN OBYEK WISATA PANTAI PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DI KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **14 Februari s/d 14 April 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 10 Februari 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Madya
 Nip : 19620624 199303 1 003

Tembusan Yth
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
 2. Bertinggal.

SIMAP PTSP 10-02-2022



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231



3. Lampiran Surat Izin Dari Kantor Pemerintahan



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
 Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
 Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 01 Maret 2022

Kepada

Yth. 1. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
 KOTA MAKASSAR
 2. KEPALA DINAS PARIWISATA
 KOTA MAKASSAR
 DI -
 MAKASSAR

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/ 343 -II/BKBP/II/2022

- Dasar** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).
- Memperhatikan** :
- Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 26615/S.01/PTSP/2022 Tanggal 10 Februari 2022 perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada prinsipnya Kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : A. DIANINDARWATI
NIM / Jurusan : 105611103017 / Ilmu Adm. Negara
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UNISMUH
Tanggal pelaksanaan : 01 Maret s/d 14 April 2022
Jenis Penelitian : Skripsi
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar
Judul : "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN OBYEK WISATA PANTAI PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DI KOTA MAKASSAR"

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Melalui Email Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com.

a.n. WALIKOTA MAKASSAR

KEPALA BADAN KESBANGPOL.

u.b.

SEKRETARIS,

(Signature)
DR. HARI, S.I.P., S.H., M.H., M.Si
 Pangkat : Pembina Tingkat IV.b
 NIP : 19730607 199311 1 001

Tembusan :

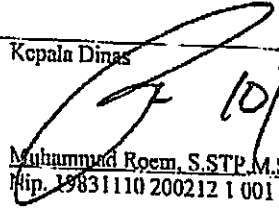
1. Walikota Makassar di Makassar (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar (sebagai laporan);

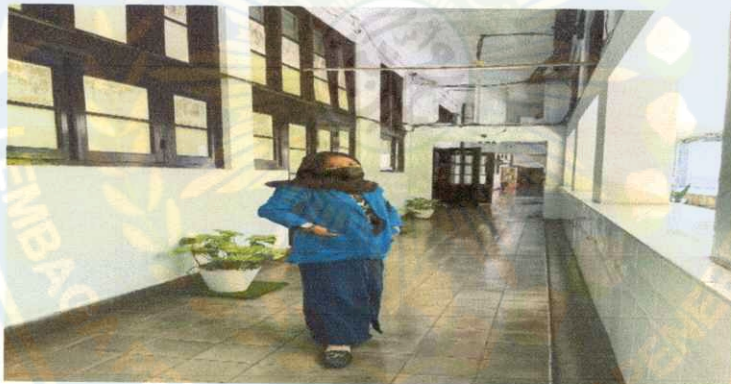
4. Lampiran Surat Izin Dari Kantor Dinas Pariwisata Kota Makassar


PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PARIWISATA

Jl. Urip Sumartono No. 58, Makassar 90143. Phone/Fax : 0411 - 424 832
 [E : makasembere@gmail.com] - [T : 0824_sombere] - [W : www.tourism-makassar.id]
 Facebook Fanpage : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : KES	Diterima tgl : 10/02/2022
Nomor surat : 090/443-11/0kep/11/2021	No agenda : 24
Tgl surat :	Sifat :
Perihal : Surat Izin penelitian	
Diteruskan kepada Sdr : <input type="radio"/> Sekretaris <input type="radio"/> Kabid Ekonomi Kreatif <input type="radio"/> Kabid Promosi dan Pemasaran <input checked="" type="radio"/> Kabid Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata <input type="radio"/> Kabid Pengembangan Kapasitas <input type="radio"/> UPT. Pantai Losari <input type="radio"/> UPT Event	Dengan hormat harap : <input type="radio"/> Tanggapan Dan Saran <input type="radio"/> Proses Lebih Lanjut <input type="radio"/> Koordinasi / Konfirmasi <input type="radio"/> Untuk Dihadiri <input type="radio"/> Untuk Di ketahui <input checked="" type="radio"/> Untuk Di Tindak Lanjuti <input type="radio"/> Untuk Diingalkan
Catatan : Izin penelitian An. A. Dianindarwati terkait pengembangan objek wisata pantai 10/3/22	Kepala Dinas  10/3/2022 Muhammad Roem, S.STP, M.Si Nip. 19831110 200212 1 001

LAMPIRAN 2**DOKUMENTASI WAWANCARA****1. Wawancara Bersama Kepala Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata**

Pada Hari Kamis 24 Maret 2022 pada jam 07.00

2. Wawancara Bersama Plt Bidang Pelestarian Cagar Budaya



Pada Hari Rabu 11 Mei 2022 Pada Jam 10.05

3. Wawancara Bersama Wisatawan Pantai Akkarena



Pada Hari Selasa 29 Maret 2022 Pada jam 10.35

4. Wawancara Bersama Wisatawan Pantai Akkarena



Pada Hari Selasa 29 maret 2022 Pada Jam 11.00

5. Wawancara Bersama Wisatawan Pantai Akkarena



Pada Hari Selasa 29 maret 2022 Pada Jam 11.35

6. Wawancara Bersama Masyarakat



Pada Hari Selasa 29 maret 2022 Pada Jam 11.53

LAMPIRAN 3**Dokumentasi Fasilitas Pantai Akkarena****1. Fasilitas Taman****2. fasilitas Wahana Air****1. Dermaga**

LAMPIRAN 4

Surat Keterangan Bebas Plagiat

1. SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPI PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Negeri Korpri - Gedung Assalaam No 259 Makassar 90221 Telp 0412 3679723 Fax 0412 3679723

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPI Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : A. Dianindarwati
NIM : 105611104017
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	9 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	2 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPI- Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Dititikan surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 13 Juli 2022
Mengetahui

Kepala UPI- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nursinah, S Hum, M.L.P
NBM 964 591

2. HASIL PLAGIAT BAB 1



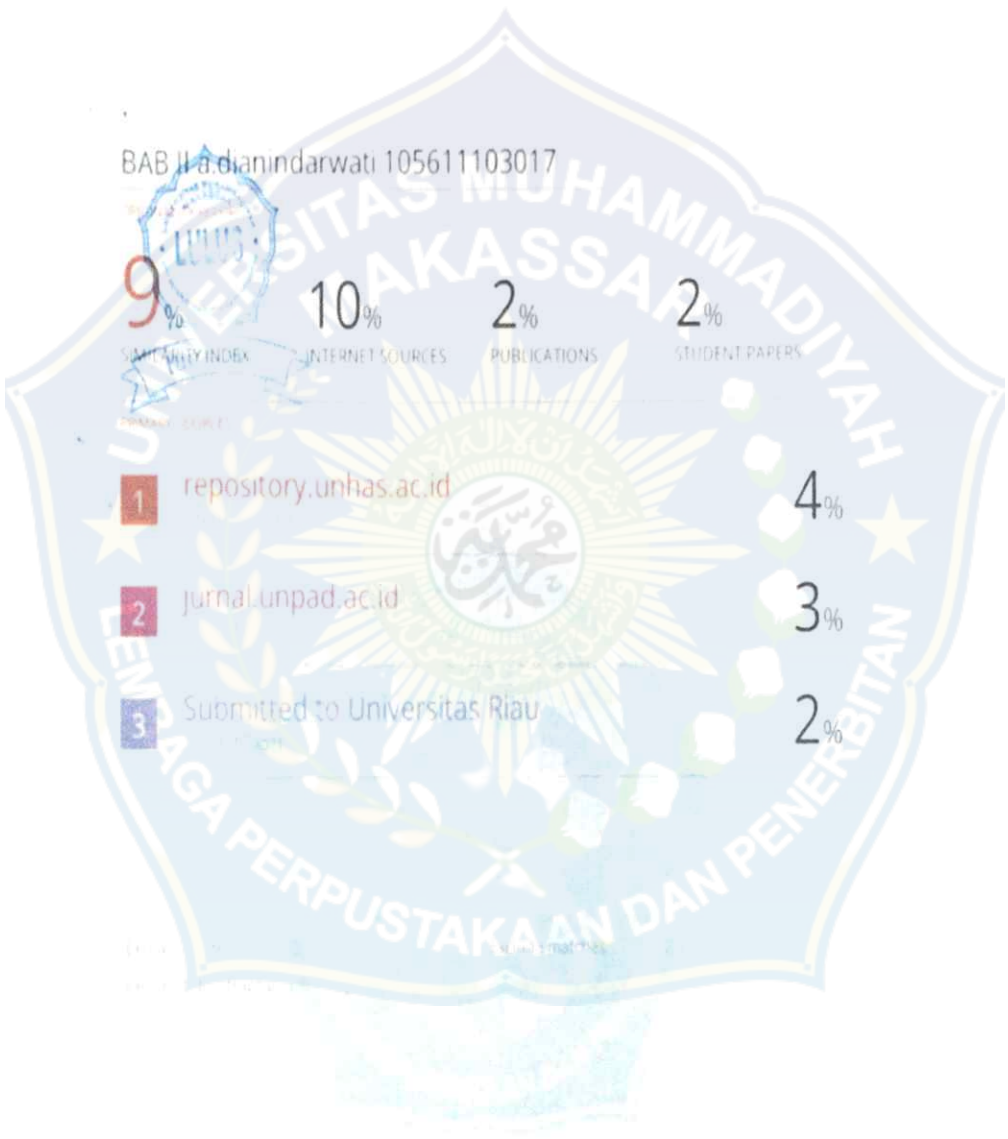
BAB I a.dianindarwati 105611103017



3. HASIL PLAGIAT BAB 2



BAB II a dianindarwati 105611103017



4. HASIL PLAGIAT BAB 3



BAB III a dianindarwati 105611103017

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

1

Submitted to Universitas PGRI Palembang

2%

2

repository.stiedewantara.ac.id

2%

3

123dok.com

2%

4

digilib.iir-suka.ac.id

2%

5

repository.unika.ac.id

2%

Exclude matches
Exclude matches

Exclude matches

5. HASIL PLAGIAT BAB 4



BAB IV a.dianindarwati 105611103017



Permalink: [http://digilibadmin.unismuh.ac.id](#)

Exclude from citation

Exclude from citation

6. HASIL PLAGIAT BAB 5



BAB V a.djanindarwati 105611103017



SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS



digilibadmin.unismuh.ac.id

2%



RIWAYAT HIDUP



A. Dianidarwati, yang lebih kenal dengan nama Indar, lahir di Ujung pandang 1 Desember 1998. Anak Pertama, lahir dari pasangan suami istri Bapak Ahmad Bahri dan Ibu Raja Sitti. Riwayat pendidikan penulis yaitu menyelesaikan pendidikan formal di SD Bertingkat Bara-Baraya II pada tahun 2011, pada tahun yang sama penulis

melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 26 Makassar dan selesai pada tahun 2014. Kemudian pada tahun sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Muhammadiyah Disamakan pada tahun 2017. Karena memiliki keinginan kuat dalam hal pendidikan penulis melanjutkan jenjang pendidikan di salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Makassar yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar, dan terdaftar sebagai salah satu Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, dengan nomor stambuk 105611103017.

Berkat petunjuk serta pertolongan dari Allah SWT, usaha dan doa kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan **judul “Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pengembangan Obyek Wisata Pantai Pada Dinas Pariwisata Di Kota Makassar ”**. Semoga penelitian tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi terutama bagi dunia pendidikan khususnya dalam pengembangan Ilmu Administrasi Negara. Jangan Lupa Bersyukur dan Tetap Jadi pribadi Yang Baik.